



**RENCANA STRATEGIS
DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
TAHUN 2024-2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategi (Renstra) Instansi Pemerintah merupakan salah satu faktor yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka mencapai *good governance* yang dimaksud, instansi pemerintah harus secara kontinyu melakukan evaluasi programnya yang meliputi evaluasi untuk peningkatan kualitas struktur, evaluasi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan tanggap terhadap perubahan serta antisipatif terhadap masa yang akan datang.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan *Public Service* (Pelayanan Masyarakat) dari segi infrastruktur, pengendalian banjir, penataan dan pemeliharaan taman, pengelolaan reklame, serta pelayanan Penerangan Jalan Umum. Pemerintahan yang baik dicerminkan dengan mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Secara substansial, rencana strategis penanganan sektor bina marga dan sumber daya air di Kota Bekasi harus berprinsip pada *Sustainability Development Goals (SDGs)* atau Tujuan pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari 17 Tujuan. Terdapat 2 Tujuan SDGs yang selaras dengan tugas pokok DBMSDA yaitu Tujuan 9 Industri Inovasi dan Infrastruktur dan Tujuan 11 Kota dan Pemukiman berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan penanganan sektor bina marga dalam kondisi mantap dan pengelolaan sumber daya air yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang serta ikut serta mendukung pembangunan ruang interaksi masyarakat.

Urgensi Penyusunan Rencana Strategis DBMSDA Tahun 2024 – 2026 ini dikarenakan belum terdapatnya dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai pedoman Tahun 2024 -2026 diakibatkan masa transisi antara selesai masa jabatan Walikota Bekasi TA 2018-2023 pada tahun 2023 dengan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Penyusunan Rencana Startegis DBMSDA Tahun 2024 – 2026 disusun dengan menyeleraskan kepada RPD Tahun 2024 – 2026 yang disusun secara paralel.

Dengan demikian perencanaan strategis ini merupakan suatu rencana induk secara komprehensif yang menggambarkan bagaimana organisasi

mencapai tujuan dan sasarannya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan sampai terpilihnya Walikota baru dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan timbul. Rencana Strategis Dinas BMSDA Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kewenangan yang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat Kota Bekasi, kecuali urusan-urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan pada era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih ditekankan pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana strategis yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Bekasi akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk Kota Bekasi.

Rencana strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ini (Renstra DBMSDA) ini disusun seksama, bersinergi dengan Rencana Strategi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (Renstra PUPR), Renstra Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR)

Provinsi Jawa Barat, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat terkait dengan proyek nasional dan proyek provinsi yang melewati dan dibangun di Kota Bekasi.

Renstra DBMSDA ini memuat kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki, penataan ruang kawasan, serta pengendalian dan pemanfaatan wilayah dengan mempertimbangkan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011.

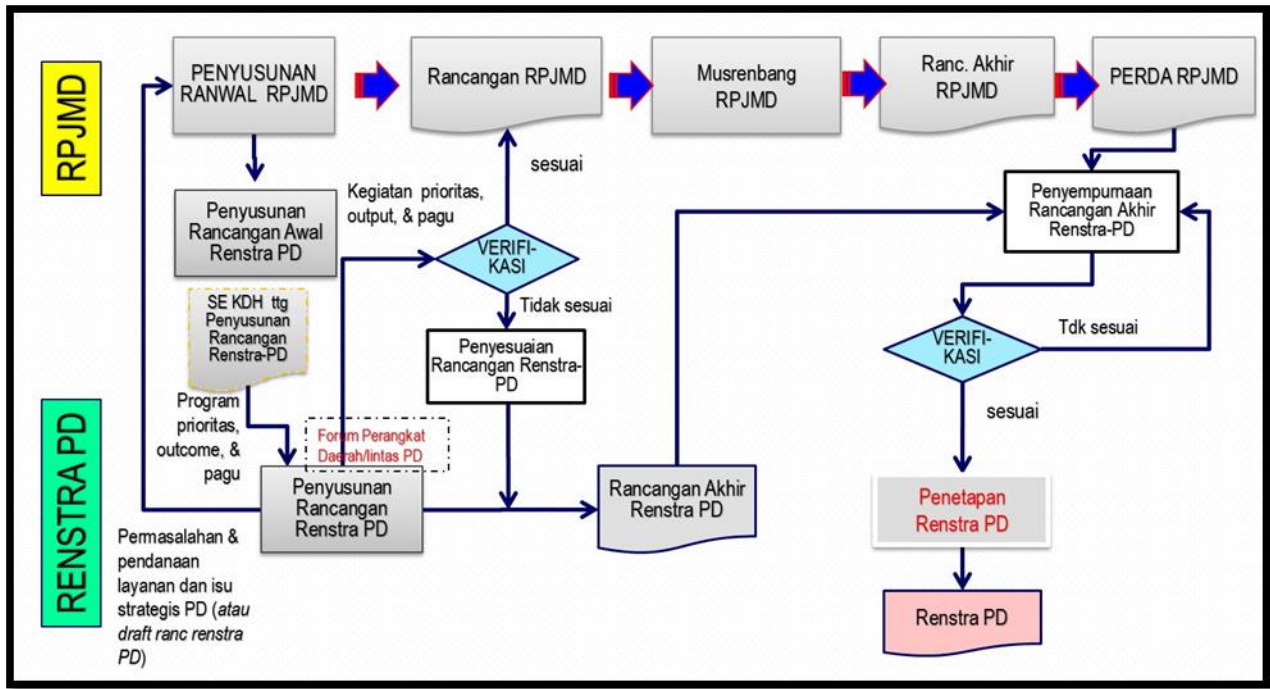
Selain peluang pengembang wilayah, Renstra DMSDA ini juga bersinergi dengan prinsip pembangunan Kota Bekasi yaitu pembangunan berkelanjutan. Dengan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi.

Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi ke arah yang diinginkan.

Rencana Strategis ini wajib dikomunikasikan ke seluruh stakeholder yang terlibat dengan tujuan membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh para stakeholder tersebut dalam memajukan Kota Bekasi. Selanjutnya dibutuhkan iklim dan lingkungan yang kondusif didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan Pemerintahan Kota untuk meningkatkan partisipasi, kehidupan sosial, perekonomian masyarakat dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera.

Proses penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan RPD Kota Bekasi serta dipadukan dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2024-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan Renstra PD
Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang disempurnakan oleh Keputusan Kementrian Dalam Negeri No 050-5889 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun dokumen rencana pembangunan daerah, dokumen rencana perangkat daerah, dan dokumen pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur yang baru tersebut. Oleh karena itu perlu adanya penyelarasan antara SOTK Dinas BMSDA berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor. 122 Tahun 2021 dengan Permendagri Tahun 90 Tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunannya, Renstra DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain :

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara RI nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025.
- u. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
- v. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi;
- w. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 – 2031;

- x. Keputusan Walikota Nomor 060/Kep.355-ORG/XI/2008 tentang Pembakuan Nomenklatur, Literatur dan Istilah Bahasa Inggris Terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- aa. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
- cc. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2024-2026 adalah untuk menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Dinas. Renstra ini juga diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan Pimpinan Kota Bekasi.

Tujuan penyusunan Renstra DBMSDA Kota Bekasi 2024-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan infrastruktur dan tata air yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan tercapainya visi dan misi Kota Bekasi;
- b. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif;
- c. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- d. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, *outcomes*, dan *outputs* yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan di dalam menilai kinerja organisasi.
- e. Menjadi acuan dalam penyusunan:
 - Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - APBD Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
 - Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Renstra DBMSDA Kota Bekasi merupakan aplikasi dari manajemen modern yang berorientasi kepada hasil dengan memperhatikan harapan masyarakat (*bottom up*) maupun stakeholder serta lingkungan strategis internal dan eksternal (*top down*) yang perumusan strategisnya dilakukan dengan menggunakan analisa *Balance Scorecard* (termasuk didalamnya analisa SWOT). Renstra DBMSDA Kota Bekasi bersifat dinamis yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan lingkungan dari masyarakat dalam memberikan pelayanan.

Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam suatu organisasi sangat bermanfaat dan memegang peranan penting, antara lain:

- a. Diperlukan untuk mendiagnosa kinerja organisasi dalam mencapai hasil yang diinginkan dengan memaksimalkan kekuatan dan meminimalkan kelemahan.
- b. Memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktifitas kegiatan di masa datang dengan pemberian tanggung jawab, uraian pekerjaan dan pemanfaatan sumber daya.

- c. Menjadikan pencapaian indikator kinerja sebagai fokus utama organisasi serta mengukur kemajuan pencapaian hasil.
- d. Dapat meningkatkan komunikasi baik vertikal maupun horizontal antar unit kerja.

1.2 Sistematika Penulisan

Renstra DBMSDA Kota Bekasi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dikemukakan Latar Belakang secara ringkas yang mencakup pengertian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, fungsi Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, keterkaitan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dengan RPD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pada bagian ini dikemukakan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas BMSDA, Sumber Daya Dinas BMSDA yang dimiliki Dinas BMSDA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, capaian Kinerja Pelayanan Dinas BMSDA yang dimiliki Dinas BMSDA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas BMSDA.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas BMSDA beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas BMSDA yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas BMSDA yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas BMSDA ditinjau dari sasaran jangka menengah

Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air provinsi/kabupaten/kota, dan RTRW.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas BMSDA.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas BMSDA dalam tiga tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas BMSDA yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas BMSDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Bab VIII Penutup

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air Sub Urusan Sumber Daya Air, Drainase, Jalan, Pengembangan Jasa Konstruksi, Penerangan Jalan Umum dan Taman. DBMSDA dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

DBMSDA Kota Bekasi akan senantiasa menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi. Adapun peran layanan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh DBMSDA Kota Bekasi meliputi:

- a. Menyediakan infrastruktur jalan kota yang mantap, aman, efisien, nyaman dan terjangkau.
- b. Meningkatkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan sumber daya air lainnya.
- c. Meningkatkan pengembangan kinerja sumber daya air Kota Bekasi.
- d. Meningkatkan pelayanan Jasa Konstruksi
- e. Meningkatkan pelayanan ketersediaan lampu penerangan jalan umum.
- f. Pengelolaan dan pemeliharaan taman
- g. Perizinan dan penertiban reklame

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2018 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi, DBMSDA Kota Bekasi berkedudukan sebagai

unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air sub urusan Sumber Daya Air, Drainase, Jalan, Pengembangan Jasa Konstruksi, Penerangan Jalan Umum dan Taman.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air, Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi serta bidang prasarana jalan meliputi pengembangan penerangan jalan umum dan taman.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 122 Tahun 2021, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, Prasarana Jalan sub urusan sumber daya air, drainase, jalan, jasa konstruksi dan Penerangan Jalan Umum dan Taman;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas; Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.
- k.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris, Empat Bidang, UPTD dan Fungsional yaitu:

- a. Sekretariat
- b. Bidang Bina Marga
- c. Bidang Sumber Daya Air
- d. Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi
- e. Bidang Prasarana Jalan
- f. UPTD
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan perencanaan, kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Untuk menyelenggarakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;

7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala;
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas.

Sekretariat , membawahkan:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.3 Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi ruang milik jalan, pengembangan dan pembangunan jalan dan jembatan serta operasional pemeliharaan jalan dan jembatan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Bina Marga mempunyai uraian fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penataan, pembangunan, pengembangan, pendataan, pemetaan, pemantauan dan pengendalian dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang jalan;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, inventarisasi, pengembangan, penyusunan dan peningkatan dalam pelaksanaan pembangunan jalan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, rehabilitasi dan inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan;

6. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah terkait;
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
9. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Bina Marga, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Subtansi Pemanfaatan Ruang Jalan;
- b. Kelompok Subtansi Pembangunan Jalan;
- c. Kelompok Subtansi Pemeliharaan Jalan.

2.1.4 Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan sumber daya air, penataan drainase perkotaan dan pemeliharaan saluran untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, penataan, perbaikan, pembangunan serta penyediaan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya air;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pembangunan, penataan, rehabilitasi, pengembangan dan pemberian advis teknis dalam pelaksanaan penataan drainase perkotaan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, normalisasi dan pengembangan serta inovasi dalam pelaksanaan pemeliharaan drainase;

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Subtansi Pengembangan Sumber Daya Air;
- b. Kelompok Subtansi Penataan Drainase Perkotaan;
- c. Kelompok Subtansi Pemeliharaan Drainase.

2.1.5 Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi

Bidang ini mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan bina marga, perencanaan sumber daya air serta pengembangan jasa konstruksi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Dinas;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemetaan, pengolahan, pengembangan, perumusan, pengujian, penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan perencanaan bina marga;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemetaan, pengolahan, pengembangan, perumusan, pembinaan, penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan perencanaan sumber daya air;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemetaan, pengolahan, pengembangan, perumusan, penyusunan, penyiapan, pemantauan dan evaluasi serta pemberian rekomendasi dalam pelaksanaan Pengembangan Jasa Konstruksi;

6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Jasa Konstruksi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional :

- a. Kelompok Subtansi Perencanaan Bina Marga;
- b. Kelompok Subtansi Perencanaan Sumber Daya Air;
- c. Kelompok Subtansi Pengembangan Jasa Konstruksi.

2.1.6 Bidang Prasarana Jalan

Bidang Prasarana Jalan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pengembangan penerangan jalan umum, pengembangan taman untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Bidang Prasarana Jalan dan Jasa Konstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya; Paraf Koordinasi Kabag Organisasi Kabag Hukum;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, pengarah, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan penerangan jalan umum;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengembangan, pengarah, pendistribusian, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan dalam pelaksanaan pengembangan taman;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pemeliharaan, pengembangan dalam pelaksanaan fasilitasi sarana penerangan jalan umum dan taman;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;

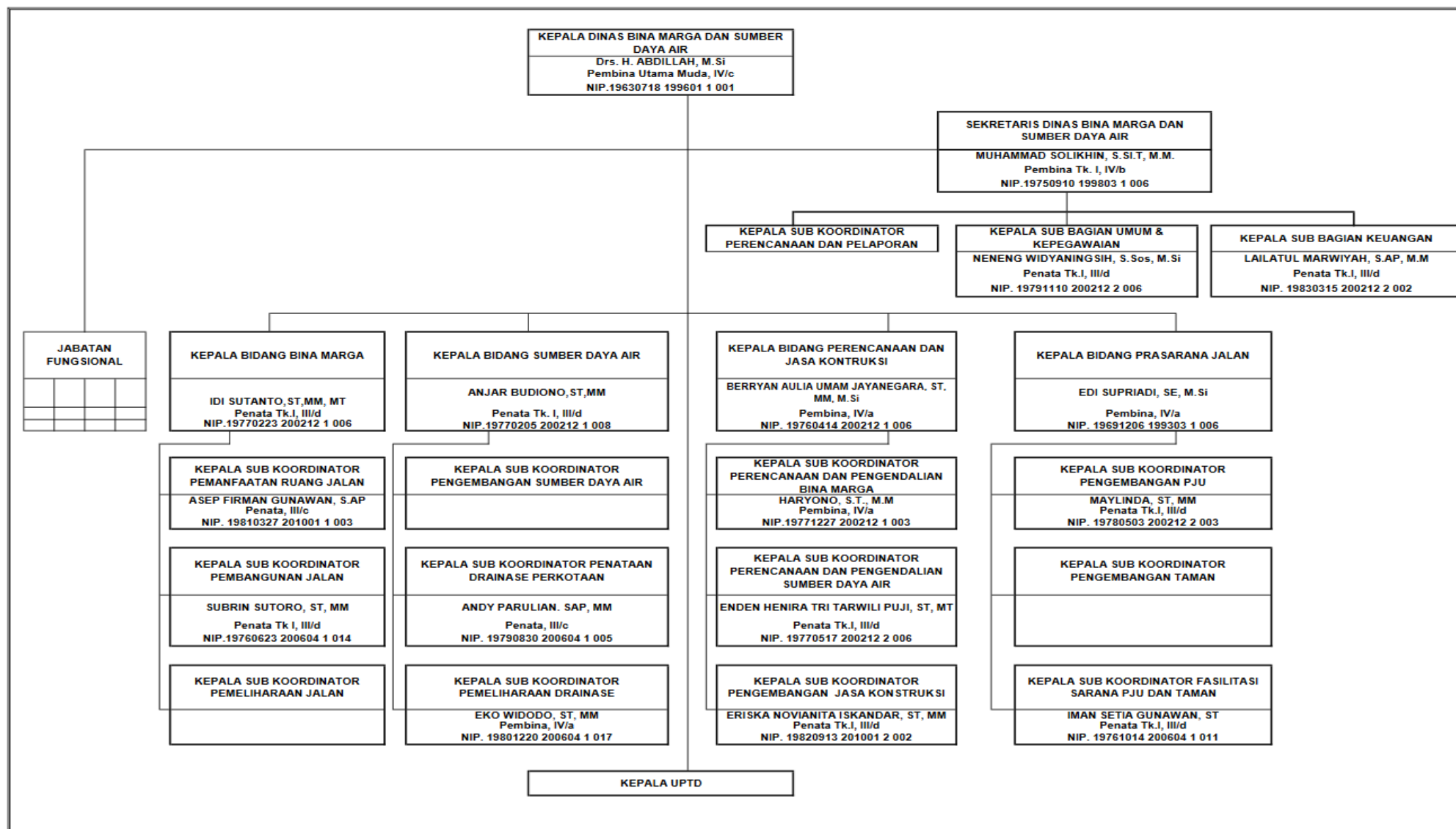
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas

Bidang Prasarana Jalan, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional:

- a. Kelompok Subtansi Pengembangan Penerangan Jalan Umum;
- b. Kelompok Subtansi Pengembangan Taman;
- c. Kelompok Subtansi Fasilitas Sarana PJU dan Taman.

Terlampir struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 122 Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi (Desember 2022)



UPTD DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR					
Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Bekasi Utara	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Bekasi Timur	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Bekasi Selatan	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Bekasi Barat	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Rawalumbu	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Mustikajaya
YUDISTIRA, SE, MM Penata Tk I III/d NIP. 19810830 201001 1 006	SUWADI, ST Penata Tk I III/d NIP. 19820925 201001 1 009	TOTO SUGIARTO, S. Sos, M.Si Pembina, IV/a NIP. 19660711 199901 1 001	EDI BERNANTA TARIGAN, ST Penata Tk I III/d NIP. 19800505 201001 1 011	ABDUL MUIS, ST Penata Tk I III/d NIP. 19641003 198503 1 003	TEGUH WICAKSONO, S.E., M.M. Pembina, IV/a NIP. 19760414 200604 1 016
Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Bantargebang	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Pondok Gede	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Pondok Melati	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Jatiasih	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Jatisampurna	Kepala UPTD Pengawasan Jalan, Jembatan dan Saluran Kec. Medan Satria
BUDIMAN, SE Penata Tk I III/d NIP. 19760929 201001 1 004	HARI NUGROHO, ST Penata Tk I III/d NIP. 19790807 201001 1 009	OGI KARDITA, SE Penata, III/c NIP. 19710625 200604 1 014	MUSTONO, ST, MM Pembina, IV/a NIP. 19760707 200604 1 018	FAIZAL ALANG, S. Sos Penata Tk I, III/d NIP. 19690309 199803 1 006	H. CHAERUL AZIS, SH, M.Si Penata Tk. I, III/d NIP. 19850717 200501 1 005
Kepala UPTD Alat Berat dan Perbengkelan	Kepala UPTD Pematusan dan Pemeliharaan Bangunan Air	Kepala UPTD Pengendali PJU WIL. I (Kec. Bekasi Utara, Kec. Medan Satria, Kec. Bekasi Timur, Kec. Bekasi Selatan, Kec. Bekasi Barat dan Kec. Jatiasih)	Kepala UPTD Pengendalian PJU WIL. II (Kec. Bantargebang, Kec. Mustikajaya, Kec. Rawalumbu, Kec. Pondok Gede, Kec. Pondok Melati dan Kec. Jatisampurna)	Kepala UPTD Pertamanan WIL. I (Kec. Bekasi Utara, Kec. Medan Satria, Kec. Bekasi Timur, Kec. Bekasi Selatan, Kec. Bekasi Barat dan Kec. Jatiasih)	Kepala UPTD Pertamanan WIL. II (Kec. Bantargebang, Kec. Mustikajaya, Kec. Rawalumbu, Kec. Pondok Gede, Kec. Pondok Melati dan Kec. Jatisampurna)
TONI PURWANTO, SE, MA Pembina, IV/a NIP. 19700116 199012 1 001	SUROYO, ST Penata, III/c NIP. 19811117 201101 1 001	LUKI DIAN PRIHANTONO, SE, MM Pembina, IV/a NIP. 19760426 199901 1 002	SOENARYO UTOMO, SE, MM Penata Tk. I, III/d NIP. 19740929 200212 1 005	NINING SUNINGSIH, ST, MM Penata Tk. I, III/d NIP. 19760504 200902 2 003	LIA LESTARI PUTRI, S.T Penata Tk. I, III/d NIP. 19790914 200604 2 007

2.1.7 Standard Operational Procedure (SOP) DBMSDA Kota Bekasi

Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi DBMSDA berdasarkan peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 diselenggarakan pelayanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP), berikut tabel SOP DBMSDA:

Tabel 2.2 Tabel SOP Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2022

NO	JUDUL	UNIT KERJA
1	SURAT MASUK	SEKRETARIAT
2	SURAT KELUAR	
3	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	
4	PENYUSUNAN KARTU INVENTARIS RUANGAN (KIR)	
5	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)	
6	PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)	
7	PENGUMPULAN DAN PELAPORAN DATA CAPAIAN KINERJA	
8	PENERBITAN SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)	
9	PENYUSUNAN KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)	
10	PEMBUATAN SASARAN KINERJA PEGAWAI (SKP)	
11	USULAN KENAIKAN PANGKAT	
12	PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN (DUK)	
13	PERMOHONAN CUTI PNS	
14	PERMOHONAN PEMBUATAN KARIS/KARSU	
15	PERMOHONAN PEMBUATAN TABUNGAN ASURANSI Pensiun (TASPEN)	
16	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA HASIL AKHIR PEKERJAAN (FINAL HAND OVER / FHO	PERENCANAAN
17	PELAKSANAAN PENGAMBILAN SEMPEL BETON SEGAR	
18	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN ADMINISTRASI HASIL PEKERJAAN	
19	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN WAKTU PEKERJAAN KONSTRUKSI	

20	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN TEKNIS PEIL BANJIR	
21	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN DALAM RANGKA SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (FINAL HAND OVER / FHO)	
22	PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	PJU
23	PENYERAHAN BASET PENERANGAN JALAN UMUM DARI PIHAK KETIGA	
24	PENERBITAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERSETUJUAN ALOKASI PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN	
25	PEMELIHARAAN TAMAN DAN ORNAME PADA MEDIAN JALAN	TAMAN
26	PELAKSANA PERBAIKAN DARURAT JALAN (URC)	BINAMARGA
27	PENERBITAN BERITA ACARA SERAH TERIMA FISIK, PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM, KAWASAN PERUMAHAN, PERDAGANGAN, DAN INDUSTRI OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI	
28	PENETAPAN TENTANG SETATUS RUAS JALAN DI KOTA BEKASI	
29	PENERTIBAN REKOMENDASI TEKNIS RUMIJA	REKLAME
30	PENANGANAN PEMATUSAN DAN PEMELIHARAAN JALAN UMUM	UPTD PEMATUSAN
31	PERENCANAAN OPERASIONAL PENGAWASA PELAKSANA PEMBAGUNAN KEGIATAN JALAN, SALURAN DAN JEMBATAN	UPTD PJJS
32	PENGAWASA PELAKSANAAN PEMBAGUNAN KEGIATAN JALAN, SALURAN DAN JEMBATAN	
33	MONITORING PEMASANGAN REKLAME	UPTD PJJS
34	FASILITAS PENERBITAN REKLAME	
35	PEMELIHARAAN ALAT BERAT DAN KENDARAAN OPERASIONAL	UPTD ALAT BERAT
36	PENGOPERASIAN ALAT BERAT	
37	PENGELOLAAN KEBUN BIBIT	TAMAN
38	PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMELIHARAAN TAMAN	
39	PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAMAN	

40	PERENCANAAN PEMELIHARAAN TAMAN	
41	FASILITASI PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM	
42	FASILITASI PEMBANGUNAN JALAN UMUM SWAKELOLA	PJU
43	MONITORING PENERANGAN JALAN UMUM	
44	PENYUSUNAN PERENCANAAN PENGANGGARAN KEGIATAN BIAYA LANGSUNG URUSAN (BLU)	PERENCANAAN
45	PELAKSANAAN MONITORING DAN PENGENDALIAN REKOMENDASI PENGGUNAAN RUANG MILIK JALAN	
46	PELAKSANAAN MONITORING, PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEGIATAN BIDANG	

2.2 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas DBMSDA, terutama dalam menciptakan DBMSDA sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*.

2.2.1 Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di DBMSDA Kota Bekasi sebanyak 355 orang yang terdiri dari PNS dan Tenaga honorer. Untuk selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai DBMSDA Kota Bekasi

No.	Pegawai	Jumlah
1	PNS	156
2	TKK	199
Total		355

**data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Desember 2021*

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lemtekda Kota Bekasi, maka pengisian formasi jabatan struktural di DBMSDA Bekasi terdiri dari eselon II, III, dan IV yaitu sebanyak 39 orang. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai DBMSDA Kota Bekasi yang menduduki
Jabatan Tahun 2021

No.	Eselon Jabatan	Pria	Wanita	Jumlah
1	II b	1	-	1
2	III a	1	-	1
3	III b	3	1	4
4	IV a	25	8	33
Total				39

**data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Desember 2021*

Pegawai Dinas BMSDA Kota Bekasi memiliki pegawai dengan Jabatan Fungsional sebanyak 22 orang dan Pegawai dengan Jabatan Pelaksana 101 orang

Untuk daftar sesuai dengan tingkat golongan pegawai yang berada di lingkungan DBMSDA selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5 Jumlah pegawai DBMSDA berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2021

No.	URAIAN	JUMLAH	PROSEN TASE
1	Golongan IV	11 Pegawai	7,05
2	Golongan III	105 Pegawai	67,31
3	Golongan II	38 Pegawai	24,36
4	Golongan I	2 Pegawai	1,28
JUMLAH		156 Pegawai	100

**data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Desember 2021*

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar aparatur Dinas BMSDA tingkat pendidikan terakhirnya adalah S1 sekitar 163 orang. Terlampir jumlah pegawai Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebagai berikut:

Tabel 2.6 Jumlah Pegawai DBMSDA Kota Bekasi berdasarkan Pendidikan Tahun 2021

No.	Pendidikan	KETERANGAN		Jumlah
		PNS	TKK	
1	S3	1	-	1
2	S2	29	1	30
3	S1	82	81	163
4	D3	1	13	14

5	SLTA	37	89	126
6	SLTP	4	9	13
7	SD	2	6	8
JUMLAH		156	199	355

**data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Desember 2021*

Disamping tingkat pendidikan formal, pejabat yang ada di DBMSDA Kota Bekasi mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Selengkapnnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Pejabat DBMSDA Kota Bekasi yang mengikuti penjenjangan

No.	Jabatan/Staf	Pria	Wanita	Jumlah
1	Spamen/Diklat PIM II	1		1
2	Spamen/Diklat PIM III	5		5
3	Adum/Adumla/Diklat PIM IV	19	1	20
Total				26

2.2.2 Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di DBMSDA Kota Bekasi tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini:

Tabel 2.8 Sarana Kerja Bina Marga dan Sumber Daya Air

No	Uraian	Jumlah Barang			Satuan	Ket.
		Baik	Rusak	Rusak Berat		
1	Tanah dan Bangunan	2,275			M2	Workshop
2	Gedung	1			Unit (2 Lantai) M2	Workshop
3	Listrik	13			Jaringan	
4	Telpon	1			Line (1 Fax)	
5	Area Parkir	1			Area	
6	Ruang Rapat	1			Ruang	
7	Ruang Arsip	2			Ruang	
8	Kendaraan Roda 4	44		5	Unit	
9	Kendaraan Roda 2	39		5	Unit	
10	Kendaraan Truck	16			Unit	
11	Meja Rapat	7	4		Set	
13	Ac	25	15		Unit	
14	Komputer Pc	28	5		Unit	

15	Komputer Notebook	22		4	Unit	
10	Printer	33			Unit	
11	Meja Kerja	138	83		Unit	
12	Kursi Kerja	140	85		Unit	
13	Filling Kabinet	17	22		Unit	
14	Rak Arsip	19	1		Unit	
15	Infokus	6			Unit	
16	Jaringan Internet	9			Jaringan	
17	Lemari Arsip	19	14		Unit	

Sarana-prasarana penunjang aparaturn Dinas BMSDA Kota Bekasi tersebut sudah memadai namun dibutuhkan sarana non fisik seperti kebutuhan aplikasi (*software*) untuk mendukung sistem perencanaan, penelitian dan pengembangan yang ditunjang oleh SDM yang mengoperasikan sistem tersebut.

2.2.3 Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

Dalam rangka kemudahan informasi dan komunikasi publik maka Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air telah membuka jalur komunikasi publik, sebagai berikut :

Tabel 2. 9 : Daftar Sarana Informasi Dalam Pelayanan Publik

1.	Fitur Tanya Jawab pada kota bekasi - SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id - Call Center 1500 444 dan 119 - LPID : ppid.bekasikota.go.id
2.	Manajemen email : Dinasdisbimarta@gmail.com
3.	Website : dbmsda.bekasikota.go.id
4.	Twitter : @bmsdakotabekasi
5.	Instagram : @bmsdakotabekasi

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kinerja pelayanan DBMSDA Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik
- b. Persentase jembatan dalam kondisi baik
- c. Persentase saluran/ Drainase dalam kondisi baik
- d. Persentase Kecukupan ruang Terbuka Hijau
- e. Persentase pedestrian yang dibangun dan dipelihara
- f. Persentase utilitas dalam kondisi baik

Secara umum ada 6 indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, namun dalam pelaksanaannya terdapat dinamika perubahan sehingga dilakukannya Review Renstra DBMSDA Tahun 2018-2023 dengan mengacu pada perubahan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Atas perubahan Renstra tersebut berdampak pada perubahan indikator kinerja pelayanan menjadi :

- a. Presentase panjang jalan dalam kondisi baik
- b. Persentase jembatan dalam kondisi baik
- c. Persentase saluran/ Drainase dalam kondisi baik
- d. Persentase Polder dalam kondisi baik
- e. Persentase pedestrian dalam kondisi baik
- f. Persentase PJU dalam kondisi baik
- g. Persentase Reklame dalam kondisi baik
- h. Persentase Taman dalam kondisi baik

Sebagaimana yang dituangkan dalam tabel 2.10 ada 6 indikator DBMSDA Kota Bekasi dapat merealisasikan semua target yang ada secara baik, dan 3 indikator yang belum tercapai. Mulai tahun 2013 – 2018 capaian tersebut dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala diantaranya

- Terdapat masalah pembebasan tanah/ lahan

- Pelaksanaan proyek tidak sesuai rencana awal (keterlambatan waktu).

Namun kendala tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga kinerja dapat dicapai secara optimal.

Adapun kendala yang mempengaruhi rendahnya capaian tersebut yaitu:

- Adanya pembangun proyek pemerintah berupa pembangunan infrastruktur Monorel, Pembangunan tol Becakayu dan tol alternatif Cibubur.
- Adanya Billboard yang dibongkar sehingga mengurangi potensi pajak reklame

Untuk detail mengenai pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel 2.10 dibawah ini.

Tabel 2.10 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2018-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Presentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik	0.05 %	0.05 %	-	-	-	1.76 %	1.08 %	-	-	-	353%	215%	-	-	-
2	Presentase Jembatan dalam Kondisi Baik	4.0 %	4.0 %	-	-	-	30.76 %	0.15 %	-	-	-	769%	3.84 %	-	-	-
3	Presentase drainase dalam kondisi baik	1.0 %	1.0 %	-	-	-	0.876 %	0.52 %	-	-	-	88%	52%	-	-	-
4	Presentase kecukupan ruang terbuka hijau	0.006 %	0.006 %	-	-	-	0.067%	1.11 %	-	-	-	1117%	18500%	-	-	-
5	Presentase pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difable dan lansia	0.5 %	0.5 %	-	-	-	1.76 %	0.23 %	-	-	-	353%	45%	-	-	-
6	Presentase utilitas dalam kondisi baik	11.90 %	11.90 %	-	-	-	12.12 %	17.05 %	-	-	-	101%	143%	-	-	-
7	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	NA	NA	A	A	A	-	-	BB							
8	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	NA	NA	2.35 %	2.35 %	2.35 %	-	-	2.86 %			-	-	121%		
9	Persentase jembatan dalam kondisi baik	NA	NA	0.06 %	0.76 %	0.06 %	-	-	0.17 %			-	-	287%		
10	Persentase drainase dalam kondisi baik	NA	NA	0.32 %	0.32 %	0.32 %	-	-	0.28 %			-	-	87%		
11	Persentase Polder dalam kondisi baik	NA	NA	1.82 %	2.24 %	2.24 %	-	-	0			-	-	0		
12	Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	NA	NA	1.34 %	1.67 %	1.67 %	-	-	1.66 %			-	-	124%		
13	Persentase PJU dalam kondisi baik	NA	NA	1.61 %	1.61 %	1.61 %	-	-	1.93 %			-	-	120%		
14	Persentase Reklame dalam kondisi baik	NA	NA	25%	25%	25%	-	-	3.13 %			-	-	13%		
15	Persentase Taman dalam kondisi baik	NA	NA	8.34%	9.96 %	11.78 %	-	-	13.53 %			-	-	162%		

Pada segi anggaran kegiatan DBMSDA pada tahun 2018-2023, terlihat terjadi penurunan anggaran pada Tahun 2020 , namun untuk realisasi anggaran rata- rata mencapai 80 %. Di Tahun 2021 terjadi peningkatan Anggaran, terlihat anggaran yang besar adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dengan anggaran terserap sebesar 95,17 %. Selain Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), program Program Penyelenggaraan Jalan memiliki anggaran yang besar dengan realisasi sebesar 85, 72 %.

Untuk lebih detailnya, anggaran dan realisasi pelayanan DBMSDA 2018-2023 dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11 tabel Anggaran dan Realisasi Pelayanan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi 2018-2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Anggaran Pada tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20
1	Program pelayanan Adminstrsai Perkantoran	9.584.900.000	11.325.425.000				8.921.185.640	10.653.412.265				93.08 %	94.07 %			
2	Program peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	954.000.000	877.000.000				307.143.000	618.286.963				32.20 %	70.50 %			
3	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.000.000					-					0				
4	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	43.270.000					13.270.000					30.67 %				
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			34.108.379.000					31.188.381.208					91.44 %		
6	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	6.253.796.140	-	-			4.623.112.140	-				73.9 %	-	-		
7	Program Pengelolaan Jalan	361.187.176.266	107.464.632.071	-			318.505.096.475	72.041.566.709				88.1 %	67 %	-		
8	Program Pengelolaan Sistem Drainase	163.543.865.240	79.101.200.000,00	-			148.900.391.801	63.357.557.835,00				91 %	80.1 %	-		
9	Program Penyelenggaraan Infrastruktur Pemukiman Di Kawasan Strategis	67.421.800.000	76.775.994.300,00	-			65.176.267.801	64.907.332.064,00				96.7 %	84.5 %	-		
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah	-	7.180.415.000,00	-				6.523.641.210,00				-	90.8 %	-		
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	-	-	56.584.563.500			-	-	51.818.184.300			-	-	91.58 %		
12	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	-	-	201.337.121.335			-	-	191.645.073.907			-	-	95.17 %		
13	Program Pengembangan Permukiman	-	-	63.413.858.691			-	-	56.512.919.385			-	-	89.12 %		
14	Program Penyelenggaraan Jalan	-	-	193.048.765.850			-	-	165.485.517.624			-	-	85.72 %		
15	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	665.777.900			-	-	599.141.093			-	-	89.99 %		
16	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-	100.000.000			-	-	95.494.390			-	-	95.49 %		
17	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	-	-	11.602.900.000			-	-	10.803.708.087			-	-	93.11 %		

Sebagaimana target pemerintah untuk meningkatkan kapasitas layanan khususnya yang terkait dengan pelayanan dasar pada masyarakat seperti ketersediaan infrastruktur diantaranya jalan, jembatan dan sarana drainase. Hal ini menjadi pertimbangan mendasar mengingat kondisi geografi kota Bekasi yang rentan terhadap resiko bencana alam dalam hal ini banjir. Berdasarkan letak geografis dan fungsi kota Bekasi yang berada di jalur silang yang menghubungkan ibukota negara dengan beberapa daerah penyangga strategis lainnya, sehingga diperlukan daya dukung jalan yang memadai hal ini sesuai dengan data volume lalu lintas yang meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya peningkatan ketersediaan infrastruktur dilakukan dengan beberapa langkah-langkah strategi sebagai berikut :

- Meningkatkan jalan, trotoar dan jembatan yang terbangun dan terpelihara
- Meningkatkan saluran/ drainase yang terbangun dan terpelihara
- Meningkatkan luas wilayah yang terbebas dari genangan air
- Meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum

Sehingga pada tahun 2017, terdapat penambahan pagu sebagai implikasi dari perubahan nomenklatur DBMSDA, penambahan layanan berupa :

- Persentase Luasan lahan terbuka hijau
- Persentase Tertata dan terkendalinya dekorasi kota
- Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kota
- Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air kota.

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Pada tahun 2021 Dinas BSMDA Kota Bekasi memiliki 5 sasaran yang harus diwujudkan yaitu: Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya, Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan dan jembatan layak untuk menunjang masyarakat, Meningkatkan ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat, Meningkatkan ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame) dan Meningkatkan infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.11 Capaian Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2021	
				Target	Realisasi
1	2	3	4	5	5
Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik pada Dinas BMSDA	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	Meningkatnya kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Nilai akuntabilitas kinerja DBMSDA	A	BB
Meningkatkan Fungsi Jalan	Kemantapan Jalan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur jalan, dan jembatan, yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	2,35%	2,86 %
			2. Persentase jembatan dalam kondisi baik	0,06%	0,17 %
Meningkatkan Sistem Drainase untuk mengurangi resiko banjir	Ketinggian titik banjir	Meningkatnya ketersediaan saluran dan bangunan air yang layak untuk menunjang masyarakat	1. Persentase drainase dalam kondisi baik	0,32%	0,32 %
			2.Persentase Polder dalam kondisi baik	1,82%	0
Meningkatkan ketersediaan	Kemantapan fasilitas	Meningkatnya ketersediaan fasilitas penunjang	1.Persentase Pedestrian dalam kondisi baik	1,34%	1,66 %
			2. Persentase PJU dalam kondisi baik	1,61%	1,93 %

fasilitas penunjang	penunjang	infrastruktur (Pedestrian, taman, penerangan jalan umum, dan reklame)	3. Persentase Reklame dalam kondisi baik	25,00%	3,13 %
Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Lingkungan Hidup yang Nyaman di Kota Bekasi	Persentase Taman dalam Kondisi Baik	Meningkatnya infrastruktur ruang terbuka hijau yang berkualitas	1. Persentase Taman dalam kondisi baik	8,34%	13,53 %

Secara umum terlihat bahwa dari tiap – tiap indikator kinerja mencapai dari target kinerja yang telah ditetapkan namun terdapat beberapa capaian indikator kinerja yang tidak terpenuhi pada tahun 2021 yaitu:

- Capaian indikator “Nilai Akuntabilitas Kinerja DBMSDA” pada tahun 2021 diperoleh realisasi BB dari target A.
- Capaian indikator “Persentase Polder dalam kondisi baik” diperoleh realisasi sebesar 0% dari target sebesar 1,82%.
- Capaian indikator “ Reklame dalam kondisi baik” diperoleh realisasi sebesar 3,13 % dari target 25 %.

Adapun faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target sebagaimana yang diuraikan diatas adalah dikarenakan adanya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional sehingga terjadi refocussing keuangan untuk penanganan bencana Covid 19. Akibatnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi melaksanakan penyesuaian anggaran belanja daerah untuk penanganan bencana Covid 19. Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah untuk penanganan bencana Covid 19, menjadi faktor Dinas BMSDA Kota Bekasi tidak maksimal dalam melakukan kegiatan Rutin / kegiatan yang sudah direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 dikarenakan mengalami penurunan (rasionalisasi) anggaran. Selain faktor bencana covid 19, adanya kurang kesesuaian penentuan indikator kinerja Dinas BMSDA pada indikator tertentu sehingga pada beberapa kegiatan Dinas BMSDA tidak dapat terhitung menjadi capaian indikator kinerja Dinas BMSDA.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Dinas BMSDA terutama indikator yang tidak terpenuhi pada tahun 2021 dapat dilakukan upaya rencana aksi sebagai berikut:

- Untuk Indikator “Presentase Polder dalam kondisi baik” rencana aksi sebagai berikut:
 - Dinas BMSDA mengusulkan pembangunan tampungan air atau polder di wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir

- Menjalin Kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan DKI Jakarta, Bogor, Depok dan Kabupaten Bekasi.
- Untuk indikator “Presentase Reklame dalam kondisi baik” rencana aksi sebagai berikut:
 - Untuk Reklame adalah Melakukan koordinasi dengan OPD terkait yaitu Bapenda dan DPMPTSP dalam rangka pengendalian penyelenggaraan reklame di Kota Bekasi; Melakukan monitoring dan pendataan terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin serta yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor pajak reklame; Melakukan penertiban berupa pembongkaran terhadap reklame tidak berizin serta penyelenggaraan reklame yang penempatannya tidak sesuai dengan ketentuan.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

DBMSDA Kota Bekasi harus menghadapi beberapa tantangan terkait pengembangan pelayanan PD. Namun, ada beberapa peluang yang dimiliki DBMSDA untuk dimanfaatkan dalam pengembangan pelayanan PD. Untuk itu, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DBMSDA dijabarkan dalam bagian ini.

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang harus dihadapi DBMSDA dapat dikelompokkan menjadi tiga sebagai berikut:

- a. Tantangan berkaitan dengan pemanfaatan Daerah Manfaat Jalan terdiri dari:
 - Masih rendahnya kondisi kemantapan jalan dan jembatan yang ada.
 - Masih banyak ruas jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, antara lain:
 - Saluran tepi jalan,
 - Pedestrian.
 - Penerangan Jalan Umum
 - Masih adanya kawasan-kawasan yang belum mempunyai aksesibilitas

jalan yang seimbang.

- Pengawasan Aset Ruang Milik Jalan.
 - Kapasitas jalan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.
 - Banyaknya alat-alat berat yang rusak berat.
 - Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana jalan maupun pematusan.
- b. Tantangan berkaitan dengan sumber daya air terdiri dari:
- Pembebasan lahan pada pembangunan penampungan air
 - Adanya perubahan alih lahan dari lahan tangkap air menjadi perumahan atau kawasan industri
 - Masih kurang optimalnya fungsi saluran yang ada
 - Masih banyak saluran yang belum dilengkapi sarana dan prasarana penunjang antara lain:
 - Pintu air,
 - Rumah pompa,
 - Alat berat.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap saluran.
 - Belum adanya penanganan terpadu pengendalian banjir dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, daerah – daerah perbatasan, dan stakeholder lain yang terkait.
- c. Tantangan berkaitan dengan PJU dan Taman terdiri dari:
- Masih belum tersedianya *ducting* untuk pemasangan jaringan utilitas.
 - Pembebasan lahan
 - Kesadaran masyarakat untuk memelihara taman

2.4.2 Peluang

Peluang yang dimiliki oleh DBMSDA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Keberadaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- Adanya sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD Kota (APBD Provinsi dan APBN) yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan.
- Adanya Badan Kerja Sama Pembangunan (BPKSP) Jabodetabekjur.
- Adanya Kerjasama antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi terkait Sinergitas Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan yang berbagi ruas dengan Kabupaten Bekasi, Sinergitas Rencana Pembangunan Jalan dan Jembatan yang Berbatasan Sisi Jalan dengan Kabupaten Bekasi, dan Sinergitas Rencana Revitalisasi dan Pembangunan Saluran / Crossing yang berbatasan dengan Kabupaten Bekasi.
- Adanya Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi APBD.
- Kerja sama dengan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur kota (jalan dan sistem pematusan serta sarana dan prasarana pendukungnya).

2.4.3 Telaah terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kajian terhadap Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode 2020-2024 terhadap Kota Bekasi sebagai berikut:

a. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

b. Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi :

- Misi 3 yaitu Menyelenggarakan pelayanan yang efektif dan efisien di bidang tata kelola, perencanaan, pengawasan, informasi, dan hubungan kelembagaan.
- Misi 4 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, penyelenggaraan jasa konstruksi, dan pembiayaan infrastruktur dalam mendukung penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- c. Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi
 - Meningkatnya konektivitas jaringan jalan
 - Meningkatnya pemenuhan kebutuhan SDM bidang konstruksi yang kompeten dan profesional
 - Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian PUPR dan Tugas Teknis Lainnya.
- d. Prioritas Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Prioritas Pembangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Program dan Kegiatan
- f. Melihat dan mengkaji program dan kegiatan Kementerian PUPR maka program yang terkait tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi antara lain:
 - Program Ketahanan Sumber Daya Air, terdiri dari kegiatan: (2) Pengendalian Banjir, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantau; (3) Pengembangan Bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya; (5) Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA Serta Penanggulangan Darurat Akibat Bencana; dan (8) Perencanaan, Pemrograman, Penganggaran, dan Evaluasi
 - Program Infrastruktur Konektivitas, terdiri dari kegiatan: (3) Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Program Dukungan Manajemen: (16) Pembinaan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; (25) Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Bidang PUPR

2.4.4 Telaah terhadap Rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Wilayah (RTRW) Kota Bekasi

Sesuai hasil kajian rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air disusun dengan perspektif menuju keadaan pada masa depan yang diharapkan, bertitik tolak dari data, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang

dapat dipakai, serta memperhatikan keragaman wawasan kegiatan tiap sektor. Perkembangan masyarakat dan lingkungan hidup berlangsung secara dinamis; ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, agar rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air yang telah disusun itu tetap sesuai dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan keadaan, rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air dapat ditinjau kembali atau disempurnakan secara berkala.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang 24 tahun 1992, membawa perubahan yang cukup mendasar bagi pelaksanaan kegiatan penataan ruang, salah satunya pada aspek pengendalian pemanfaatan ruang, selain pemberian insentif dan disinsentif juga pemberian sanksi yang merupakan salah satu upaya sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air dan peraturan zonasi.

Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud diprioritaskan terhadap jaringan jalan yang akan membentuk poros jalan Barat-Timur dan Poros Utara-Selatan. Pola jaringan jalan yang ada saat ini dapat diarahkan perkembangannya dengan pola dasar *Grid System* yang dipadukan dengan pola lain seperti *Ring Radial*. Pola dasar *Grid System* yang dipadukan dengan pola lain tersebut akan menjamin akses yang merata ke semua arah baik untuk internal kota maupun ke sekitar Kota Bekasi. Pola dasar *Grid System* ini juga sejalan dengan pengembangan jaringan jalan sistem arteri di wilayah Jabodetabek yang merujuk kepada pola dasar *grid system* yang dipadukan dengan pola *ring radial*.

Pengembangan jaringan jalan di Kota Bekasi ini dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu peningkatan fungsi dan kondisi jalan serta pembangunan jalan baru.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam perumusan isu strategis Kota Bekasi tahun 2024 - 2026 dilakukan pendekatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mana menggunakan Pendekatan Teknokratis. Pendekatan Teknokratis dilakukan melalui analisis proyeksi perkembangan Kota Bekasi berdasarkan kondisi dan permasalahan pada bidang Bina Marga dan Sumber Daya Air yang ada saat ini untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Dalam pelaksanaan rencana pembangunan pada tahun sebelumnya menghasilkan berbagai kemajuan pembangunan, tetapi juga masih terdapat beberapa kekurangan sehingga harus dievaluasi kembali. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Untuk itu, indentifikasi permasalahan yang ada pada DBMSDA Kota Bekasi yang harus ditangani dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD berdasarkan pemetaan permasalahannya dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	belum optimal kinerja penyelenggaraan urusan infrastruktur (bidang bina marga dan sumber daya air)	Kinerja PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kurang optimal	Belum meratanya tingkat kompetensi sumber daya manusia untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan PD
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbatas dan kondisi kurang baik
			Jumlah Petugas tidak sebanding dengan wilayah yang harus ditangani

		belum optimalnya preservasi drainase perkotaan	banyak jalan kota mengalami genangan yang cukup tinggi ketika turun hujan
			sistem drainase perkotaan yang sudah mulai terintegrasi namun banyak saluran drainase perkotaan mengalami pendangkalan dan sedimentasi
			Banyaknya Bangunan liar yang dibangun di badan dan diatas sungai
			Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan drainase lingkungan
		belum optimalnya preservasi jalan	penambahan jumlah kendaraan tidak diimbangi dengan penambahan lajur jalan.
			Kondisi jalan kota bekasi belum semua dalam kondisi baik
			Belum meratanya sebaran titik penerangan jalan umum di Kota Bekasi
			Belum optimalnya pengendalian reklame
		Belum adanya kebijakan daerah terkait Program Pengembangan Jasa Konstruksi yang belum terdapat pada RPJMD Perubahan TA 2018-2023	belum berjalannya pembinaan dan pengawasan jasa konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan jalan, saluran dan infrastruktur lainnya

Permasalahan yang akan ditangani melalui Renstra di tahun mendatang berdasarkan evaluasi dan analisis saat ini yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melintas di wilayah Kota Bekasi dan menimbulkan dampak terhadap penanganan infrastruktur jalan dan jembatan diantaranya:
 - Proyek Double – Double Track (DDT) Jakarta – Cikarang,
 - Proyek Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Jakarta – Bandung,
 - Proyek Light Rail Transit (LRT) Cawang – Bekasi beserta TOD,
 - Proyek Pembangunan SPAM.

Dengan adanya PSN tersebut perlu diantisipasi dengan pembangunan infrastruktur jaringan jalan dan jembatan yang terintegrasi dengan PSN tersebut:

- Pembangunan simpang tak sebidang, *frontage*, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), Jembatan Penyeberangan Motor (JPM), untuk antisipasi proyek DDT,
- Pembangunan jalan *frontage* KCIC,

- Pembangunan Jaringan jalan, jembatan dan pedestrian akses menuju TOD LRT,
 - Pembangunan *crossing* tol dan Kalimalang.
- b. Penataan jaringan utilitas kota
- Pembuatan *ducting* untuk jaringan kabel utilitas (*fiber optic*)
- c. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum
- d. Penataan *pedestrian* kota
- e. Penataan Taman Ruang Milik Jalan (RUMIJA) dan Taman Median Jalan
- f. Penataan simpang sebidang terutama simpang sebidang yang sempit.
- g. Penambahan kapasitas jalan dan preservasi jalan kota
- h. Peingkatan kualitas pelayanan drainase perkotaan
- i. Memaksimalkan fungsi kawasan resapan
- j. Penambahan/ duplikasi *crossing* dalam rangka pengendalian banjir selatan ke utara

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan PD terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja PD antara lain:

- Sarana dan prasarana pelayanan PD
- Petugas dan Staff Ahli dalam pelayanan PD
- Arsip PD dari tahun ke tahun
- Sistem koordinasi birokrasi lintas sektor yang tidak mudah

3.2 Telaahan Renstra Kementerian Dan Dinas Terkait Di Tingkat Provinsi

3.2.1 Telaahan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2020 - 2024

Sasaran Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian PUPR sebagai suatu outcome dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Renstra Kementerian PUPR yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Kota Bekasi sebagai berikut.

1. Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, dengan indikator kinerja: (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat;
2. Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional;
3. Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau.

Permasalahan Pelayanan PD yang dapat mempengaruhi sasaran dari Renstra Kementerian PUPR 2020 - 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Permasalahan PD Ditinjau dari Implikasi Renstra Kementerian PUPR

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra PUPR	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya ketersediaan air melalui infrastruktur sumber daya air, dengan indikator kinerja: (2) Persentase peningkatan perlindungan banjir di Wilayah Sungai (WS) kewenangan pusat;	• belum optimal kinerja penyelenggaraan urusan infrastruktur (bidang bina marga dan sumber daya air)	• Database jumlah dan kondisi drainase perkotaan dan permukiman yang belum optimal • Pembebasan Lahan • kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat tentang pemeliharaan saluran permukiman • saluran perkotaan dan sungai banyak mengalami pendangkalan	• Komitmen pembangunan infrastruktur • Ketersediaan peralatan penunjang untuk pelaksanaan pembangunan dan preservasi saluran • Penunjang Pelayanan oleh Tim URC SDA, Pematusan, dan Alat Berat • Adanya dukungan dana dari pusat, provinsi, dan dana CSR • Adanya Kerjasama dengan DBMSDA dalam penyelesaian masalah banjir
2	Meningkatnya konektivitas jaringan jalan nasional		• Jumlah SDM yang belum memadai • Database infrastruktur dan kondisi jalan, jembatan dan saluran belum optimal	• Adanya dukungan dana dari pusat, provinsi, dan dana CSR • dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan di wilayah
3	Meningkatnya penyediaan akses perumahan dan infrastruktur permukiman yang layak, aman, dan terjangkau		• Beralih fungsinya fasilitas infrastruktur dan belum	• Masyarakat yang berperan aktif

			semua fasilitas yang pro disabilitas	sebagai alarm dalam pemeliharaan fasilitas.
--	--	--	--------------------------------------	---

Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan hasil telaahan sasaran jangka menengah dari Renstra Kementerian PUPR karena adanya sinergitas antara infrastruktur daerah dengan infrastruktur nasional sehingga dapat memunculkan bentrok atau permasalahan baru dari bidang pembebasan lahan, perencanaan alur jaringan jalan, drainase dan utilitas, dan lain – lain. Selain itu karena pembangunan yang masif tentunya perlu usaha lebih dalam upaya pemeliharaan fasilitas yang ada, dengan era digital sekarang tentunya memudahkan dan meningkatkan peran masyarakat sebagai alarm dalam pemberitahuan dan pemeliharaan fasilitas.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Dan Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.3.1 Telaahan RTRW Kota Bekasi

Terlampir tabel telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait tugas dan fungsi PD.

Tabel 3.5 Faktor Penghambat dan Pendorong yang Mempengaruhi Permasalahan PD Ditinjau dari Implikasi RTRW

No	Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas Dan Fungsi PD	Permasalahan Pelayanan PD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pengembangan sistem jaringan jalan	• belum optimal kinerja penyelenggaraan urusan infrastruktur (bidang bina marga dan sumber daya air)	• Jumlah SDM yang belum memadai • <i>Database</i> infrastruktur dan kondisi jalan, jembatan dan saluran belum optimal • Beralih fungsinya fasilitas infrastruktur dan belum	• Adanya dukungan dana dari pusat, provinsi, dan dana CSR • dukungan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan di wilayah

			semua fasilitas yang pro disabilitas	• Masyarakat yang berperan aktif sebagai alarm dalam pemeliharaan fasilitas.
2	Pengembangan sistem drainase dan pengendali banjir		• Jumlah SDM yang belum memadai • <i>Database</i> infrastruktur dan kondisi jalan, jembatan dan saluran belum optimal • Beralih fungsinya fasilitas infrastruktur dan belum semua fasilitas yang pro disabilitas	• Komitmen pembangunan infrastruktur • Ketersediaan peralatan penunjang untuk pelaksanaan pembangunan dan preservasi saluran • Penunjang Pelayanan oleh Tim URC SDA, Pematusan, dan Alat Berat • Adanya dukungan dana dari pusat, provinsi, dan dana CSR • Adanya Kerjasama dengan DBMSDA dalam penyelesaian masalah banjir

Dari tabel diatas terlihat untuk rencana pengembangan Kota Bekasi pada bagian jalan dan drainase agar hasilnya maksimal harus ditingkatkan terlebih dahulu performa PD dengan menentukan strategi dan program yang matang untuk meminimalisasi permasalahan yang dideskripsikan diatas agar terwujudnya tujuan RTRW Kota Bekasi pada Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2011 yaitu mewujudkan Kota Bekasi sebagai tempat hunian dan Usaha Kreatif yang nyaman dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan deskripsi permasalahan pelayanan PD pada sub bab sebelumnya terlihat faktor utama yang mempengaruhi yaitu dari segi geografi dan kondisi sarana dan prasarana PD.

Permasalahan pelayanan PD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Topografi Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan 0 – 2% sehingga sering terjadinya genangan.
- Kota Bekasi dilalui arus pergerakan lalu lintas barang dan jasa dari wilayah timur Pulau Jawa menuju Jakarta baik melalui jalan tol maupun jalan arteri.
- Kebijakan tata ruang nasional yang menetapkan Kota Bekasi sebagai pusat kegiatan wilayah dalam lingkungan Jabodetabek yang kegiatan utamanya industri dan pariwisata serta menunjang DKI Jakarta dalam bidang kependudukan dan permukiman menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi.
- Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam arah pengembangan menuju barat dan timur sehingga volume lalu lintas menjadi tinggi.
- Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan kegiatan nasional (PKN).
- Kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi dan Provinsi Jawa Barat yang menetapkan kawasan industri skala besar yang mencapai 6000 Ha berdampak terhadap meningkatnya lalu lintas di Kota Bekasi.
- Dibelahnya Kota Bekasi dalam arah barat-timur oleh jalan tol Kalimalang, Jalan Negara Bekasi Karawang, rel kereta api yang dikembangkan dengan *double track* kereta api
- Sedangkan arah utara-selatan Kota Bekasi dipisahkan oleh Kali Bekasi, Kali Kranji dan beberapa kali sekunder irigasi untuk wilayah Kabupaten Bekasi
- Pemulihan Kondisi Kota Bekasi dari Pandemi Covid-19
- Terdapat 20 sungai/kali yang melewati Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi menjadi area rawan banjir. Sungai/kali di Kota Bekasi terdiri atas:

Tabel 3.7 Daftar sungai/kali di Kota Bekasi

NO.	NAMA SUNGAI / KALI	KEWENANGAN	KONDISI	PANJANG	PANJANG	LEBAR	KEDALAMAN	KAPASITAS
				km	m			m3
1	Kali Jambe/Siluman/Asem	KOTA	Bertanggung	17,53	17530	3,00	1,50	78885
2	Kali Sasak Jarang	KOTA	Bertanggung	9,17	9170	4,00	1,50	55020
3	Kali Rawalumbu	KOTA	Bertanggung	12,94	12940	4,00	1,50	77640
4	Kali Rawa Tembaga/Galaxy	KOTA	Bertanggung	9,85	9850	4,00	1,50	59100
5	Kali Jatiluhur/Baru/Kapuk	PUSAT	Bertanggung	17,90	17900	4,00	1,50	107400
6	Kali Cakung	PUSAT	Bertanggung	27,83	27830	4,00	1,50	166980
7	Kali Bojong Rangkong	PUSAT	Bertanggung	10,16	10162	4,00	1,50	60972
8	Kali Jatikramat	PUSAT	Bertanggung	16,50	16500	4,00	1,50	99000

9	Kali Buaran	PUSAT	Bertanggung	8,90	8900	4,00	1,50	53400
10	Kali Sunter	PUSAT	Bertanggung	20,00	20000	4,00	1,50	120000
11	Kali lengkak	KOTA	Bertanggung	1,79	1790	4,00	1,50	10740
12	Kali Bulak Macan/Blencong	KOTA	Bertanggung	7,42	7420	4,00	1,50	44520
13	Kali Mangseng	KOTA	Bertanggung	3,34	3340	4,00	1,50	20040
14	Kali Bekasi	PUSAT	Bertanggung	18,30	18300	40,00	6,00	4392000
15	Kali Cikeas	PUSAT	Bertanggung	27,00	27000	20,00	6,00	3240000
16	Kali Cileungsi	PUSAT	Bertanggung	9,23	9230	40,00	6,00	2215200
17	Kali Pete	KOTA	Bertanggung	3,45	3450	4,00	1,50	20700
18	Kali Mede	KOTA	Bertanggung	3,09	3090	6,00	1,00	18540
	SALURAN IRIGASI							
19	SP Kalimalang (Tarum Barat)	Kemen PUPR & PJT II	Bertanggung	12,30	12300	15,00	3,00	553500
20	SS Bekasi Tengah	PJT II	Bertanggung	4,30	4300	4,00	1,50	25800
21	SS Bekasi Pangkal	PJT II	Bertanggung	1,92	1920	4,00	1,50	11520
22	SS Rawa Baru	PJT II	Bertanggung	6,01	6010	4,00	1,50	36060
23	SS Bekasi Utara	PJT II	Bertanggung	5,39	5390	4,00	1,50	32340
24	SS Tanah Tinggi	PJT II	Bertanggung	6,10	6100	4,00	1,50	36600
25	SS Pulo Timaha	PJT II	Bertanggung	1,40	1400	4,00	1,50	8400
TOTAL				261,822	261822			11.499.357,00

Sumber: Data Bidang Sumber Daya Air Dinas BMSDA (2020)

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis *SWOT* terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DBMSDA Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga pelaksana pembangunan. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama dua tahun ke depan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman (*SWOT analysis*) Dinas BMSDA Kota Bekasi.

- a. Kekuatan (S)
- Adanya RTRW Kota Bekasi yang memuat sistem penyediaan prasarana infrastruktur perkotaan khususnya sektor transportasi.
- Tersedianya dana pembangunan prasarana fisik yang bersumber dari Non APBD (Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Provinsi DKI Jakarta).
- Peralatan yang memadai.

- Adanya sumber daya manusia yang cukup handal dalam merespon tugas dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi.
- Adanya Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kota Bekasi

b. Kelemahan (W)

- Terbatasnya pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan ketataairan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.
- Sistem drainase kota Bekasi yang sangat dipengaruhi oleh daerah yang berbatasan.
- Kurangnya sosialisasi dari DBMSDA kepada masyarakat terkait tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur permukiman terutama normalisasi saluran permukiman.
- Masih terbatasnya kewenangan pengelolaan bantaran jaringan sungai/ irigasi serta jalan provinsi dan jalan negara.
- Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang cukup handal merespon tugas dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi

c. Peluang (O)

- Letak geografis yang menandakan Kota Jakarta membuka kesempatan untuk mengakses bantuan pusat khususnya bidang kebinamargaan dan pengairan.
- Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran.
- Peran aktif stakeholder (instansi-instansi) dalam mengkoordinasikan kegiatan khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.
- Kota Bekasi dilalui beberapa sungai ruas besar yang menghubungkan dengan kabupaten/ kota seperti Kali Bekasi, Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas, Kali Sunter, dan Kali Cakung. Sungai/kali tersebut ditangani langsung oleh pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). Untuk sistem DASnya dapat dilihat pada lampiran 3.1-3.3.
- Adanya kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.

d. Ancaman (T)

- Kondisi geografis, zona wilayah Kota Bekasi dibatasi dengan adanya jalan Tol, Rel Kereta Api, dan sungai serta bendung Bekasi sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam penyediaan prasarana Jalan maupun Saluran.
- Tingginya tingkat aksesibilitas dan volume lalu lintas ke Kota Bekasi karena adanya kebijakan program nasional (Jalan Tol, *double track* kereta api, TPA Bantargebang) dan program penyediaan permukiman dan industri skala besar.
- Tingginya biaya pembebasan tanah dan bangunan dalam pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, dan pembangunan polder.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jalan dan saluran pemukiman.
- Iklim pada daerah tropis dengan tingkat curah hujan tinggi, namun wilayah resapan air berkurang, dan adanya banjir kiriman.

Setelah menentukan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman selanjutnya melakukan pembobotan dan skala sebagai berikut:

Tabel 3.8 Matriks Internal Factors Evaluation (IFE)

No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Bobot (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
	KEKUATAN			
1	Adanya RTRW Kota Bekasi yang memuat sistem penyediaan prasarana infrastruktur perkotaan khususnya sektor transportasi.	3	0,07	0,21
2	Tersedianya dana pembangunan prasarana fisik yang bersumber dari Non APBD (Bantuan Provinsi Jawa Barat dan Bantuan Provinsi DKI Jakarta)	4	0,07	0,28
3	Peralatan yang memadai	3	0,10	0,3
4	Adanya sumber daya manusia yang cukup handal dalam merespon tugas dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi	3	0,12	0,36
5	Adanya Dukungan dan komitmen Kepala Daerah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur di Kota Bekasi	4	0,15	0,6
	Nilai		0,51	1,75
	KELEMAHAN			

1	Terbatasnya pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana jalan dan ketatairan yang bersumber dari APBD Kota Bekasi.	1	0,13	0,13
2	Sistem drainase kota Bekasi yang sangat dipengaruhi oleh daerah yang berbatasan.	2	0,12	0,24
3	Kurangnya sosialisasi dari DBMSDA kepada masyarakat terkait tanggung jawab pemeliharaan infrastruktur permukiman terutama normalisasi saluran pemukiman.	2	0,11	0,22
4	Masih terbatasnya kewenangan pengelolaan bantaran jaringan sungai/ irigasi serta jalan propinsi dan jalan negara.	1	0,05	0,05
5	Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang cukup handal merespon tugas dan fungsi Dinas BMSDA Kota Bekasi	2	0,08	0,16
	Nilai		0,49	0,8
	Total Nilai		1	2,55

Kekuatan

Skala 4= Merupakan kekuatan berskala baik/besar

Skala 3= Merupakan kekuatan berskala sedang

Skala 2= Merupakan kekuatan berskala kecil

Skala 1= Merupakan kekuatan berskala sangat kecil/tidak ada

Kelemahan

Skala 4= Merupakan kelemahan berskala sangat kecil/tidak ada

Skala 3= Merupakan kelemahan berskala kecil

Skala 2= Merupakan kelemahan berskala sedang

Skala 1= Merupakan kelemahan berskala besar

Tabel 3.9 Matriks Eksternal Factors Evaluation (EFE)

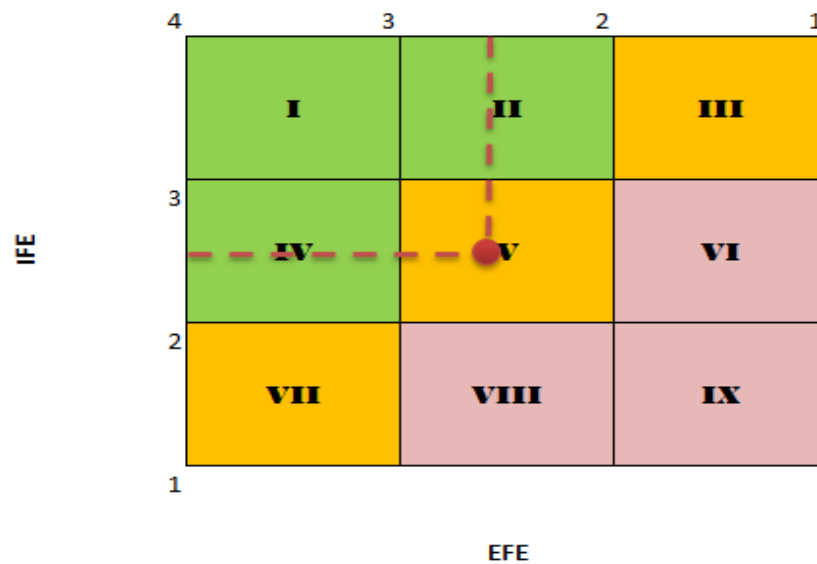
No	Critical Success Factor	Skala (1-4)	Bobot (1,0)	Adjusted Score
1	2	3	4	3x4
	PELUANG			
1	Letak geografis yang menandakan Kota Jakarta membuka kesempatan untuk mengakses bantuan pusat khususnya bidang kebinamargaan dan pengairan.	4	0,12	0,48
2	Meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan dan saluran.	4	0,1	0,4
3	Peran aktif stakeholder (instansi-instansi) dalam mengkoordinasikan kegiatan khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.	4	0,12	0,48
4	Kota Bekasi dilalui beberapa sungai ruas besar yang menghubungkan dengan kabupaten/ kota seperti Kali Bekasi, Sungai Cileungsi, Sungai Cikeas, Kali Sunter, dan Kali Cakung. Sungai/kali tersebut ditangani langsung oleh pusat yaitu Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS CC). Untuk sistem DASnya dapat dilihat pada lampiran 3.1-3.3.	4	0,09	0,36

5	Adanya kerjasama penanganan infrastruktur terutama penanganan banjir dengan pemerintah wilayah perbatasan yaitu DKI Jakarta, Bogor, Depok, dan Kabupaten Bekasi.	3	0,09	0,27
	Nilai		0,52	1,99
	ANCAMAN			
1	Kondisi geografis, zona wilayah Kota Bekasi dibatasi dengan adanya jalan Tol, Rel Kereta Api, dan sungai serta bendung Bekasi sehingga membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam penyediaan prasarana Jalan maupun Saluran.	1	0,07	0,07
2	Tingginya tingkat aksesibilitas dan volume lalu lintas ke Kota Bekasi karena adanya kebijakan program nasional (Jalan Tol, <i>double track</i> kereta api, TPA Bantargebang) dan program penyediaan permukiman dan industri skala besar.	1	0,12	0,12
3	Tingginya biaya pembebasan tanah dan bangunan dalam pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, dan pembangunan polder.	1	0,15	0,15
4	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memelihara jalan dan saluran pemukiman.	3	0,05	0,15
5	Iklim pada daerah tropis dengan tingkat curah hujan tinggi, namun resapan air berkurang, dan adanya banjir kiriman.	2	0,09	0,18
	Nilai		0,48	0,67
	Total Nilai		1	2,66

PELUANG
 Skala 4= Merupakan PELUANG berskala baik/besar
 Skala 3= Merupakan PELUANG berskala sedang
 Skala 2= Merupakan PELUANG berskala kecil
 Skala 1= Merupakan PELUANG berskala sangat kecil/tidak ada

TANTANGAN
 Skala 4= Merupakan TANTANGAN berskala sangat kecil/tidak ada
 Skala 3= Merupakan TANTANGAN berskala kecil
 Skala 2= Merupakan TANTANGAN berskala sedang
 Skala 1= Merupakan TANTANGAN berskala besar

Selanjutnya hasil nilia IFE dan EFE yang didapatkan dimasukkan kedalam tabel matriks.



Gambar 2.1 Gambar Matriks IFE dan EFE

Berdasarkan Matriks diatas maka posisi Dinas BMSDA berada dalam Kuadran V yang artinya dalam posisi Bertahan dan Menjaga. Hal ini bermakna bahwa Dinas BMSDA perlu melakukan penguatan internal sebagai Perangkat Daerah yang memiliki wewenang dalam mengelola Sumber Daya Air, Bina Marga, Jasa Konstruksi dan Pengembangan Penerangan Jalan Umum dan Taman. Hasil dari analisis dengan *SWOT analysis* didapatkan isu strategis DBMSDA Kota Bekasi adalah

- Preservasi infrastruktur jalan, jembatan, prasarana jalan, dan drainase se Kota Bekasi.
- Meningkatkan jumlah petugas yang kompeten dan sarana dengan keadaan baik dalam optimalisasi respon terutama dalam menangani banjir, ruas jalan yang terbatas, dan keamanan masyarakat.
- Meningkatkan dan memelihara penerangan jalan umum.
- Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (taman).

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun mendatang. Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan, maka Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi akan dapat mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai tiga tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai. Perumusan tujuan dan sasaran DBMSDA Air Kota Bekasi tahun 2024-2026 selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1

4.1.1 Tujuan

Tujuan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu: Optimalisasi penanganan (*Bekasi Quick Respon*) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati

4.1.2 Sasaran

Sasaran DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu: Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan, dengan 4 (empat) indikator yang mendukung pencapaian sasaran.

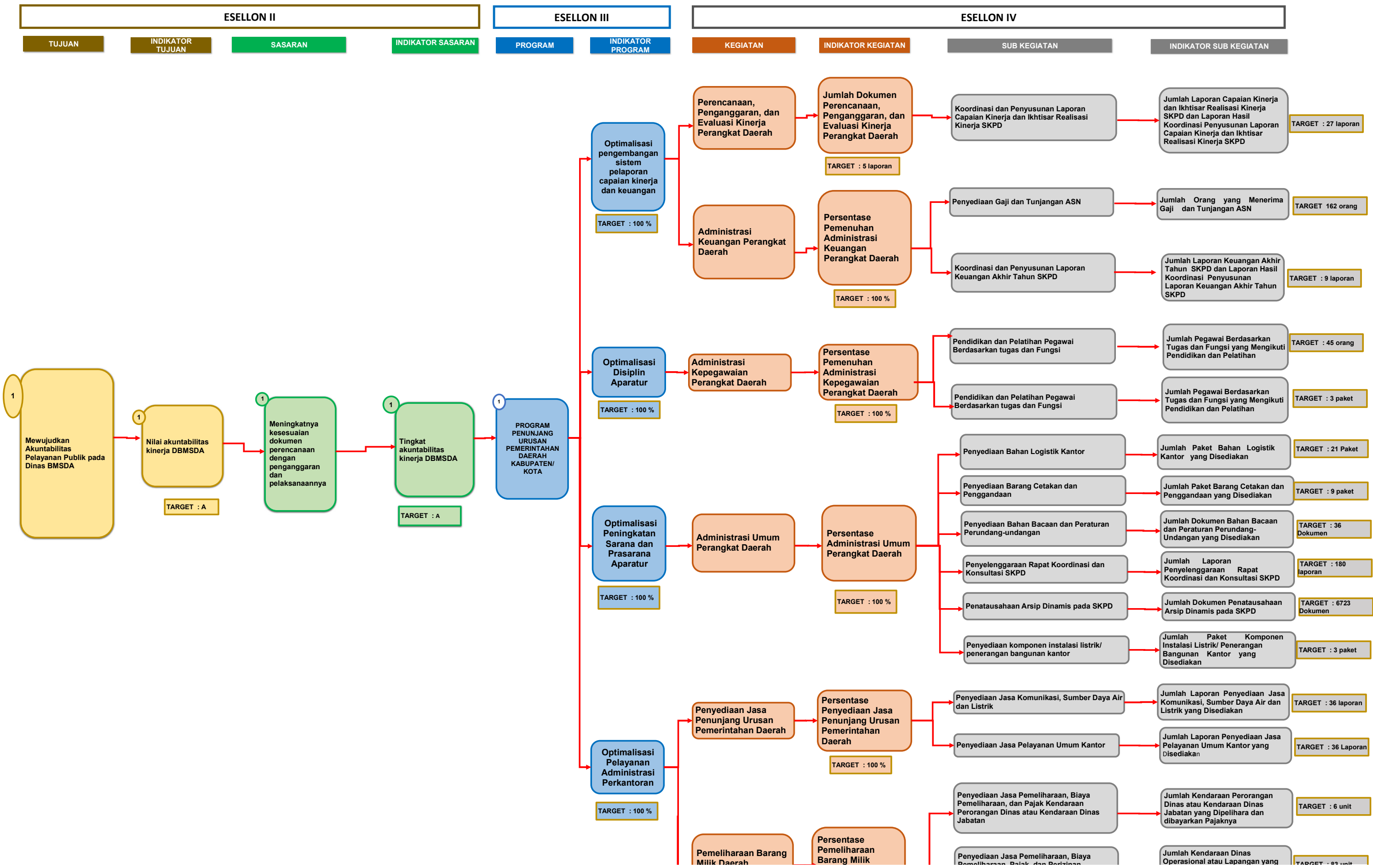
Perumusan tujuan dan sasaran DBMSDA Kota Bekasi tahun 2024-2026 beserta indikator kinerjanya selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini. Untuk perumusan tujuan dan sasaran terlampir.

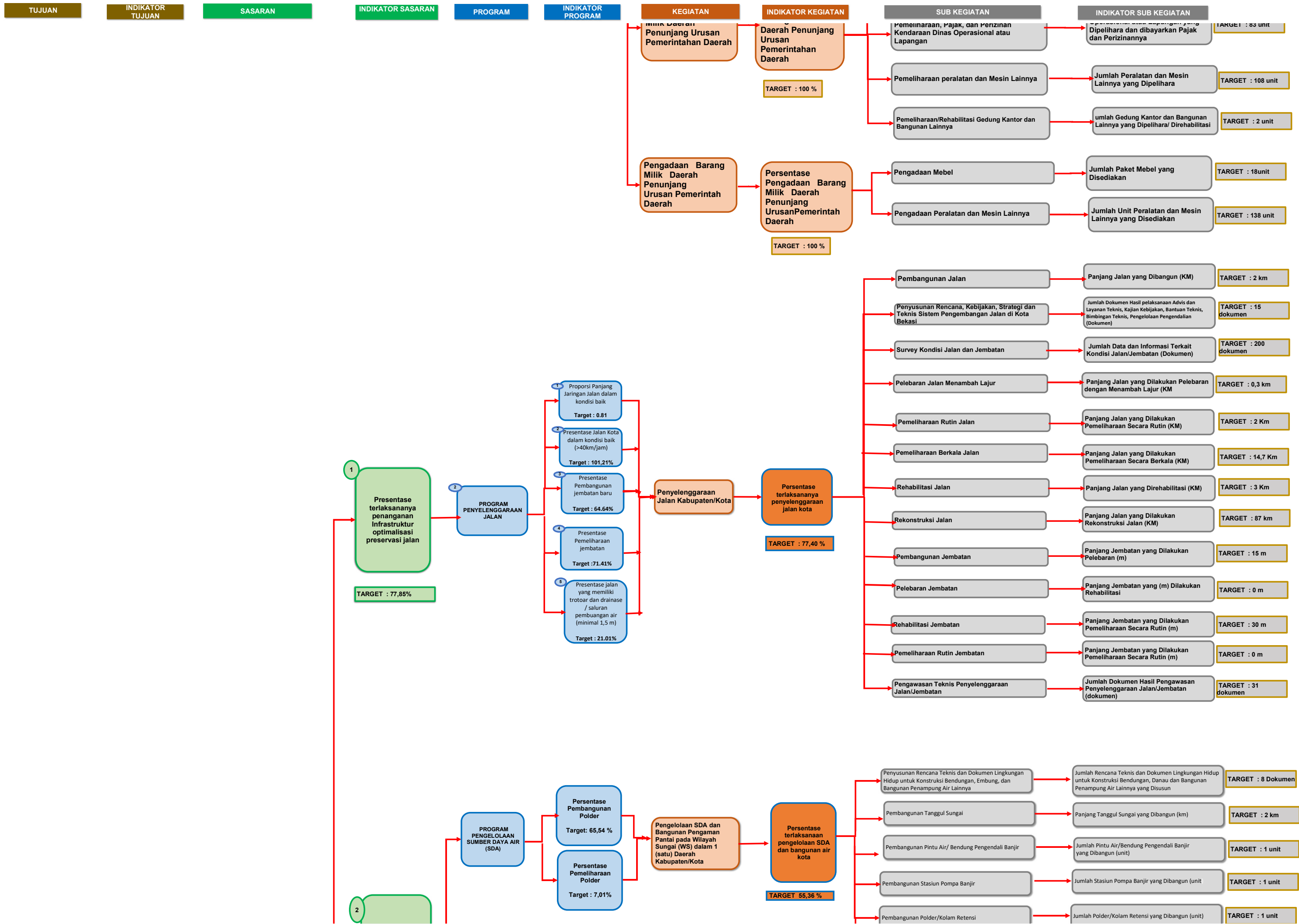
Tabel 4.1 Tujuan, dan Sasaran DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

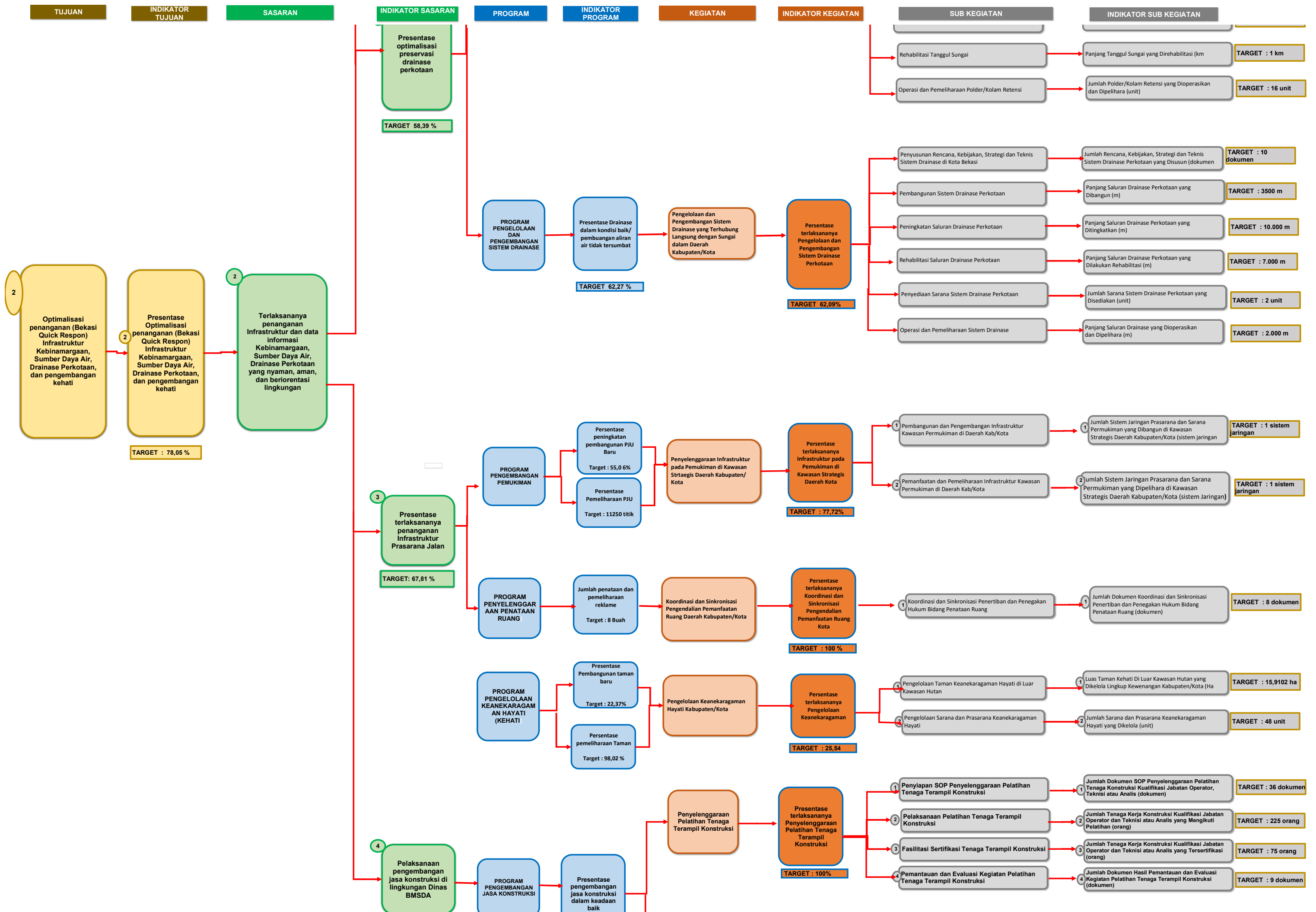
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET SASARAN		
				2024	2025	2026
				Target	Target	Target
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Tingkat akuntabilitas kinerja DBMSDA	BB	BB	BB
Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinarmargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	Presentase Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinarmargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinarmargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi jalan	77,85%	79,18%	80,52%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur dan optimalisasi preservasi drainase perkotaan	58,39%	59,48%	60,57%
			Presentase terlaksananya penanganan Infrastruktur Prasarana Jalan	67,81%	69,32%	70,83%
			Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	100%	100%	100%

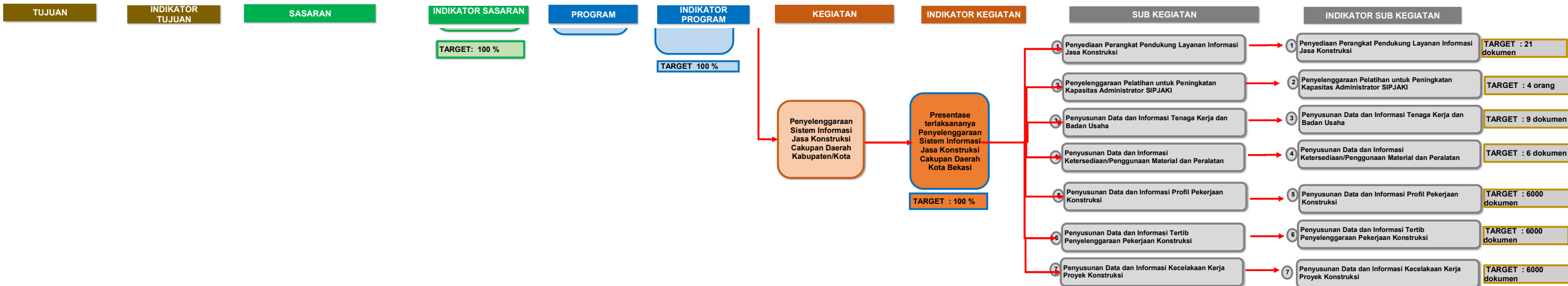
CASCADING KINERJA DBMSDA KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026

RENSTRA PERUBAHAN DBMSDA KOTA BEKASI 2024-2026









KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI



Drs. H. Abdillah, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199601 1 001

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realitas dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program oleh PD yang bersangkutan. Strategi yang dimiliki oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan preservasi berkala infrastruktur (jalan, jembatan, saluran, dan prasarana jalan) Kota Bekasi.
2. Menyediakan dan pemeliharaan polder sebagai area tampungan air sementara
3. Memanfaatkan ruang kosong sebagai taman.
4. Menyediakan penerangan jalan umum
5. Melakukan penataan dan penertiban reklame untuk menambah potensi daerah
6. Menambah petugas dan sarana dalam percepatan respon pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi bencana banjir dan kepadatan jalan.

Sedangkan Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh PD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan PD dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, dan;
2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh PD dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DBMSDA Kota Bekasi menyusun strategi dan arah kebijakan untuk modal penyusunan program dan kegiatan Dinas. Kebijakan yang dirumuskan oleh DBMSDA Kota Bekasi terdiri dari :

- a. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jembatan;
- b. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia;

- c. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi;
- d. Melakukan kegiatan pematuan drainase perkotaan secara rutin;
- e. Penambahan jumlah polder di area - area rawan banjir;
- f. Pengembangan dan pemeliharaan polder dan tampungan air sementara;
- g. Menyediakan taman hijau di pedestrian dan median jalan;
- h. Mengembangkan taman pada ruang - ruang kosong (median jalan, di bawah flyover, etc);
- i. Penataan *pedestrian* yang ramah lingkungan dan responsif gender;
- j. Penyediaan fasilitas dan pemeliharaan PJU;
- k. Penyelenggaraan dan pengendalian panggung reklame milik pemerintah;
- l. Penertiban dan pengendalian reklame milik swasta;
- m. Peningkatan kompetensi pegawai Dinas BMSDA.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan DBMSDA Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang dituangkan pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Strategis dan Arah Kebijakan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Meningkatkan kesesuaian dokumen perencanaan dengan penganggaran dan pelaksanaannya	Meningkatkan pelaporan dan penataan arsip	Penataan perencanaan, pelaporan, monitoring berbasis online
Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	1. Meningkatkan preservasi berkala infrastruktur (jalan, jembatan, saluran, dan prasarana jalan) Kota Bekasi.	1. Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jembatan.
			2. Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi.
			3. Pengembangan sistem jaringan drainase dan pengendali banjir yan terintegrasi.
			4. Melakukan pematuan rutin.

			5. Penataan pedestrian yang ramah lingkungan dan responsif gender
		2. Menyediakan dan pemeliharaan polder sebagai area tampungan air sementara	6. Penambahan jumlah polder di area - area rawan banjir
			7. Pengembangan dan pemeliharaan polder dan tampungan air sementara
		3. Memanfaatkan ruang kosong sebagai taman.	8. Menyediakan taman hijau di pedestrian dan median jalan
			9. Mengembangkan taman pada ruang - ruang kosong (median jalan, di bawah flyover, etc)
		4. Menyediakan penerangan jalan umum	10. Penyediaan dan pemeliharaan PJU
		5 . Melakukan penataan dan penertiban reklame untuk menambah potensi daerah	11. Melakukan penataan reklame pemerintah
			12. Penertiban reklame milik swasta
		6. Menambah petugas dan sarana dalam percepatan respon pelayanan kepada masyarakat terutama dalam mengatasi bencana banjir dan kepadatan jalan.	13. Peningkatan kompetensi pegawai Dinas BMSDA baik dengan in-house training maupun mengikuti pelatihan yang diadakan oleh balai pelatihan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program dan kegiatan yang disusun dan menjadi tugas dari DBMSDA Kota Bekasi selaras dengan RPD Tahun 2024-2026 Kota Bekasi. Program – program tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam kurung waktu 3 (tiga) tahun kedepan sampai terpilihnya Wali Kota Baru.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil tolok ukur indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Program dan kegiatan yang menjadi tugas DBMSDA dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu:

a. Program Rutin Dinas (Belanja Langsung Penunjang Urusan).

Program rutin dinas merupakan program nonteknis yang berlangsung untuk menunjang pekerjaan DBMSDA. Terdapat 7 (tujuh) kegiatan rutin dinas yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

b. Program Teknis

Berdasarkan Nomenklatur Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 terdapat 7 (tujuh) program yaitu:

- Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan – kegiatan pada Program Penyelenggaraan Jalan adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/kota (pembangunan, pelebaran, pemeliharaan, penambahan, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan jembatan)
2. Pembangunan *overpass*, *underpass*, dan *frontage* untuk menghadapi Proyek Strategis Nasional (PSN).

- Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Kegiatan – kegiatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota :

- Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, penyediaan sarana system drainase perkotaan, operasi dan pemeliharaan system drainase.
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase di Kota Bekasi.

- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Kegiatan – kegiatan Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
2. Pembangunan tanggul sungai, pintu air, stasiun pompa, dan polder
3. Rehabilitasi tanggul sungai
4. Operasi dan pemeliharaan polder
5. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya.

- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Kegiatan – kegiatan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keanekaragaman hayati kabupaten/ Kota (Pengelolaan Taman dan pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati).

- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Kegiatan – kegiatan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/ kota.

- Program Pengembangan Pemukiman

Kegiatan – kegiatan Program Pengembangan Pemukiman adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis Daerah kabupaten/ kota

- Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Kegiatan – kegiatan Program Pengembangan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Penyelenggaraan Pengembangan Jasa Konstruksi Kabupaten /Kota

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE					PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).				DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN. (2021)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.								Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab.	Lokasi		
													TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
													TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.				
1	2	3					4	5				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Mewujudkan akuntabilitas pelayanan publik pada Dinas BMSDA								IKT 1:	Nilai AKIP Dinas BMSDA	BB	BB		BBA		BBA					DBMSDA	Kota Bekasi			
	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel							IKS 1:	Nilai AKIP Dinas BMSDA	BB	BB	33.630.643.580	BB	33.630.643.580	BBA	33.630.643.580								
							Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota																	
								IKP 1:	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															

		1	3	1	20	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	IKK 1:	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	7.000.000	100%	21.000.000		
		1	3	1	20	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 laporan	9 Laporan		9 Laporan		9 Laporan		27 laporan			
			1	3	1	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKK 2:	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	27.390.185.000	100%	27.390.185.000	100%	27.390.185.000	100%			
		1	3	1	20	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		162 orang		162 orang		162 orang		162 orang			
		1	3	1	20	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan		3 Laporan		12 Laporan			
								IKP 2:	Optimalisasi Disiplin Aparatur											
		1	3	1	20	5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKK 3:	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%	275.000.000	100%			

		1	3	1	20	9	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian olahraga aparatur		1 paket		1 paket		1 paket					
		1	3	1	20	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		15 orang		15 orang		15 orang		45 Orang			
								IKP 3: Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
		1	3	1	20	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKK 4: Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	860.000.000	100%	860.000.000	100%	860.000.000	100%			
		1	3	1	20	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7 Paket		7 Paket		7 Paket		21 paket			
		1	3	1	20	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		3 paket		3 paket		3 paket		9 paket			
		1	3	1	20	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		12 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		36 Dokumen			
		1	3	1	20	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		60 Laporan		60 Laporan		60 Laporan		180 laporan			

		1	3	1	20	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		2241 Dokumen		2241 Dokumen		2241 Dokumen		6723 Dokumen			
		1	3	1	20	1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket		1 Paket		1 Paket		3 Paket			
								IKP 4: Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran											
		1	3	1	20	7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKK 5: Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	719.612.000	100%	719.612.000	100%	719.612.000	100%			
		1	3	1	20	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		6 unit		6 unit		6 unit		18 unit			
		1	3	1	20	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		46 unit		46 unit		46 unit		138 unit			
		1	3	1	20	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKK 6: Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	3.404.345.860	100%	3.404.345.860	100%	3.404.345.860	100%			
		1	3	1	20	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber		12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan			

							Daya Air dan Listrik yang Disediakan											
		1	3	1	20	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 laporan		12 laporan		12 laporan		36 laporan		
		1	3	1	20	9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKK 7: Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	1.174.500.720	100%	1.174.500.720	100%	1.174.500.720	100%		
		1	3	1	20	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		6 Unit		6 Unit		6 Unit		6 unit		
		1	3	1	20	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		83 Unit		83 Unit		83 Unit		83 unit		

		1	3	1	20	6	Pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		108 unit		108 unit		108 unit		108 unit			
		1	3	1	20	9	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		2 unit		2 unit		2 unit		2 unit			
Optimalisasi penangan an (Bekasi Quick Respon) Infrastrukt ur Kebinamar gaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	Terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamarga an, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan						IKT	Presentase 2: Optimalisasi penanganan (Bekasi Quick Respon) Infrastruktur Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan, dan pengembangan kehati	48.93%	76.01%		77,00%		77.98%		77.98%			
							IKS	Presentase 2: terlaksananya penanganan Infrastruktur dan data informasi Kebinamargaan, Sumber Daya Air, Drainase Perkotaan yang nyaman, aman, dan berorientasi lingkungan	75,02%	77,85%		79,18%		80,52%		80,52%			
							IKS	Presentase 3: optimalisasi preservasi drainase perkotaan	55,13%	58,39%		59,48%		60,57%		60,57%			

							IKS 4: Presentase optimalisasi preservasi jalan	65,56%	67,81%		69,32%		70,83%		70,83%			
							IKS 5: Pelaksanaan pengembangan jasa konstruksi di lingkungan Dinas BMSDA	0%	100%		100%		100%		100%			
		1	0	1			Program Penyelenggaraan Jalan			202.751.190.971		202.751.190.971		202.751.190.971		608.253.572.913	DBMSDA	Kota Bekasi
							IKP 5: Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	0.73	0.81		0.83		0.85		0.85			
							IKP 6: Presentase Jalan Kota dalam kondisi baik (>40km/jam)	95.76%	101.21%		105,01%		108,76%		108,76%			
							IKP 7: Presentase Pembangunan jembatan baru	47.88%	64.64%		64.79%		64.94%		64.94%			
							IKP 8: Presentase Pemeliharaan jembatan	93.03%	71.41%		71.93%		72.44%		72.44%			
							IKP 9: Presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	19.69%	21.01%		21.41%		21.8%		21.8%			
		1	0	1	2.		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	IKK 7: Persentase terlaksananya penyelenggaraan jalan kota	76.04%	77.40%		78.76%		80.12%		80.12%		
		1	0	1	2.	0	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun (KM)	323, 27 km	2 km		2 km		2 km		6 km	Bidang Bina Marga	

		1	0	1	2.	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan di Kota Bekasi	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian (Dokumen)	13 dokumen	15 dokumen		15 dokumen		15 dokumen		58 dokumen		Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi	
		1	0	1	2.	0	Survey Kondisi Jalan dan Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan (Dokumen)	NA	200 dokumen		200 dokumen		200 dokumen		600 dokumen		Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi	
		1	0	1	2.	0	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilakukan Pelebaran dengan Menambah Lajur (KM)	0 km	0,3 km		0,3 km		0,3 km		0,9 km		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (KM)		2 km		2 km		2 km		6 km		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	1	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (KM)		14,7 km		14,7 km		14,7 km		44,1 km		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	0	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (KM)		3 km		3 km		3 km		9 km		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	0	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan (KM)		87 km		87 km		87 km		261 km		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	1	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun		15 m		15 m		15 m		45 m		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	1	Pelebaran Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pelebaran (m)		0 m		0 m		0 m		0 m		Bidang Bina Marga	

		1	0	1	2.	1	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang (m) Dilakukan Rehabilitasi		30 m		30 m		30 m		90 m		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	1	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (m)		0 m		0 m		0 m		0 m		Bidang Bina Marga	
		1	0	1	2.	2	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan (dokumen)		31 dokumen		31 dokumen		31 dokumen		93 dokumen		Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi	
		1	0	0			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase				106.500.000.000		106.500.000.000		106.500.000.000		319.500.000.000	DBMSDA	Kota Bekasi
								IKP 10: Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	66.68%	68.27%		68.57%		68.88%		68.88%		DBMSDA	
		1	0	0	2.		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	IKK 8: Persentase terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan	61.94%	62.09%		62.24%		62.39%		62.39%			
		1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase di Kota Bekasi	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Disusun (dokumen)	10 dokumen	10 dokumen		10 dokumen		10 dokumen		40 dokumen		Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi	

		1	0	0	2.	0	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dibangun (m)	7670 m	3500 m		3500 m		3500 m		10.500 m		Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	0	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (m)		10.000 m		10.000 m		10.000 m		30.000 m		Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	0	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)		7000 m		7000 m		7000 m		21000 m		Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	0	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan (unit)		2 unit		2 unit		2 unit		6 unit		Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	0	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara (m)		2000 m		2000 m		2000 m		6000 m		Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)				87.500.000.000		87.500.000.000		87.500.000.000		262.500.000.000	DBMSDA	Kota Bekasi
								IKP 11: Presentase Pembangunan Polder	64.48%	65.54%		66.12%		66.71%		66.71%			
								IKP 12: Presentase Pemeliharaan Polder	5.14%	7.01%		8.17%		9.27%		9.27%			

		1	0	0	2.		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	IKK 9:	Persentase terlaksanaan pengelolaan SDA dan bangunan air kota	49.55%	55.36%		57.22%		59.08%		59.08%				
		1	0	0	2.	0	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya		Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		8 dokumen		8 Dokumen		8 Dokumen		36 dokumen			Bidang Perencanaan dan Jasa Konstruksi	
		1	0	0	2.	0	Pembangunan Tanggul Sungai	9	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun (km)		2 km		2 km		2 km		6 km			Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	1	Pembangunan Pintu Air/Bendung Bendung Pengendali Banjir	1	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun (unit)		1 unit		1 unit		1 unit		3 unit			Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	1	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	3	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun (unit)		1 unit		1 unit		1 unit		3 unit			Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	1	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	4	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun (unit)		1 unit		1 unit		1 unit		3 unit			Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0	2.	2	Rehabilitasi Tanggul Sungai	4	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi (km)		1 km		1 km		1 km		3 km			Bidang Sumber Daya Air	

		1	0	0	2.	5	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara (unit)	15 unit	16 unit		17 unit		18 unit		18 unit		Bidang Sumber Daya Air	
		1	0	0			Program Pengembangan Pemukiman				69.416.505.499		69.416.505.499		69.416.505.499		208.249.516.497	DBMSDA	Kota Bekasi
								IKP 13: Presentase Peningkatan Pembangunan PJU Baru	52.41%	55.06%		56.33%		57.22%		57.22%			
								IKP 14: Presentase Pemeliharaan PJU	11250 titik	11250 titik		11250 titik		11250 titik		59403 titik			
		1	0	0	2.		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	IKK 10: Persentase terlaksananya Infrastruktur pada Pemukiman di Kawasan Strategis Daerah Kota	76.39%	77.72%		78.17%		78.61%		78.61%			
		1	0	0	2.	0	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (sistem jaringan)	1 sistem jaringan	1 sistem jaringan		1 sistem jaringan		1 sistem jaringan		1 sistem jaringan		Bidang Prasarana Jalan	
		1	0	0	2.	0	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman di	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dipelihara di Kawasan	1 sistem jaringan	1 sistem jaringan		1 sistem jaringan		1 sistem jaringan		1 sistem jaringan		Bidang Prasarana Jalan	

						Daerah Kab/Kota		Strategis Daerah Kabupaten/Kota (sistem Jaringan)										
		13	02	12		Program Penyelenggaraa n Penataan Ruang				5.000.000.00 0		5.000.000.0 00		5.000.000.0 00		15.000.000. 000	DBMSDA	Kota Bekasi
							IKP 15:	Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	8 buah	8 buah		8 buah		8 buah		26 buah		
		13	02	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	IKK 11:	Persentase terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota	25%	100%		100%		100%		100%		
		13	02	12	2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang (dokumen)		8 dokumen		8 dokumen		8 dokumen		24 dokumen	Bidang Bina Marga	
		13		11		PROGRAM PENGEMBANGA N JASA KONSTRUKSI					5.161.512.000		5.076.506.000		5.076.506.000		15.314.524.000	
							IKP 16:	Presentase pengembangan jasa konstruksi dalam keadaan baik	0%	100%		100%		100%		100%		
		13		11	2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	IKK 12:	Presentase terlaksananya Penyelenggaraan	0%	100%		100%		100%		100%		

							Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi												
		1	3	1	2, 3	1 01	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis (dokumen)	-	12 dokumen		12 dokumen		12 dokumen		36 dokumen			
		1	3	1	2, 4	1 01	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)	30 orang	75 orang		75 orang		75 orang		225 orang			
		1	3	1	2, 6	1 01	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (orang)	5 orang	25 orang		25 orang		25 orang		75 orang			
		1	3	1	2, 8	1 01	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (dokumen)	1 dokumen	3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		9 dokumen			
		1	3	1	2, 13:	1 02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	IKK presentase terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kota Bekasi	0%	100%		100%		100%		100%			

		1	3	1	2, 1 02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (dokumen)	-	7 dokumen		7 dokumen		7 dokumen		21 dokumen		
		1	3	1	2, 1 02	3	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI (orang)	-	2 orang		1 orang		1 orang		4 orang		
		1	3	1	2, 1 02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha (dokumen)	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		
		1	3	1	2, 1 02	7	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan (dokumen)	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		
		1	3	1	2, 1 02	8	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi (dokumen)	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		
		1	3	1	2, 1 02	9	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi (dokumen)	-	1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		3 dokumen		

		1	3	1	2,	1	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi (dokumen)	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	3 dokumen				
		2	1	0			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)			21.000.000.000	21.000.000.000	21.000.000.000	63.000.000.000	DBMSDA	Kota Bekasi		
								IKP 17: Pembangunan Taman Baru	18.03%	22.37%	23.67%	24.98%	24.98%				
								IKP 18: Pemeliharaan Taman	64.95%	98.02%	100%	100%	100%				
		2	1	0	2.		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	IKK 15: Persentase terlaksana pengelolaan keanekaragaman hayati kota	19.41%	25.54 %	31.608 %	37.65%	37.65%				
		2	1	0	2.	0	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	14,9102 ha	15,9102 ha	16,9102 ha	17,9102 ha	17,9102 ha		Bidang Prasarana Jalan		
		2	1	0	2.	7	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola (unit)	45 unit	48 unit	51 unit	54 unit	54 unit		Bidang Prasarana Jalan		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang tertuang dalam Renstra Dinas BMSDA Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dirancang untuk memberi kontribusi terhadap pencapaian kinerja RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Dinas BMSDA mendukung pemenuhan tema pembangunan Kota Bekasi Tahun 2024-2026 terutama tema pada tahun kedua RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yaitu “Pengembangan SDM Aparatur yang kompeten, birokrasi, yang responsif dan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi” dengan prioritas pembangunan “Optimalisasi Bekasi *Quick Respon* (BQR), dengan memanfaatkan dan memaksimalkan tenaga para relawan yang berada di seluruh wilayah”. Dinas BMSDA memiliki tipe pelayanan yaitu infrastruktur mendukung dalam pencapaian indikator Indeks Infrastruktur Ke-PU-an dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Sementara dalam mencapai Indeks Reformasi Birokrasi, perencanaan merupakan bagian dalam 8 (delapan) area perubahan yaitu area penguatan akuntabilitas (Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah). Dalam penguatan implementasi SAKIP, pengintegrasian antara perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja akan membentuk sistem yang mengarah pada efisiensi penggunaan anggaran (*budget saving*). Perencanaan sebagai komponen Penilaian SAKIP memiliki bobot penilaian paling besar yaitu sebesar 30%, sedangkan Pengukuran Kinerja memiliki bobot 25%, Pelaporan Kinerja memiliki bobot nilai 15%, Evaluasi Kinerja memiliki bobot nilai 10%, dan Capaian Kinerja memiliki bobot nilai 20%.

Berikut target indikator kinerja yang terkait Dinas BMSDA Kota Bekasi tahun 2024-2026

Tabel 7.1 Indikator Kinerja DBMSDA Kota Bekasi 2024-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Terakhir Pada akhir periode RPD	KET
			2024	2025	2026		
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Optimalisasi Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Presentase Pembangunan Polder	64.48%	65.54%	66.12%	66.71%	66.71%	
6	Presentase Pemeliharaan Polder	5.14%	7.01%	8.17%	9.27%	9.27%	
7	Presentase Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	66.68%	68.27%	68.57%	68.88%	68.88%	
8	Presentase Peningkatan Pembangunan PJU Baru	52.41%	55.06%	56.33%	57.22%	57.22%	
9	Presentase Pemeliharaan PJU	11250 titik	11250 titik	11250 titik	11250 titik	59403 titik	
10	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	0.73	0.81	0.83	0.85	0.85	
11	Presentase Jalan Kota dalam kondisi baik (>40km/jam)	95.76%	101.21 %	105,01 %	108,76%	108,76%	
12	Presentase Pembangunan jembatan baru	47.88%	64.64%	64.79%	64.94%	64.94%	
13	Presentase Pemeliharaan jembatan	93.03%	71.41%	71.93%	72.44%	72.44%	
14	Presentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase / saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	19.69%	21.01%	21.41%	21.8%	21.8%	
15	Persentase pengembangan jasa konstruksi	0%	100%	100%	100%	100%	

	dalam keadaan baik						
16	Jumlah penataan dan pemeliharaan reklame	8 buah	8 buah	8 buah	8 buah	32 buah	
17	Presentase Pembangunan Taman Baru	18.03%	22.37%	23.67%	24.98%	24.98%	
18	Presentase Pemeliharaan Taman	64.95%	98.02%	100%	100%	100%	

Dari uraian urusan diatas apabila ditelaah terhadap keterkaitan dengan indikator kinerja DBMSDA Kota Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi TA 2024 – 2026, sangat terkait dengan tujuan ke 3 (tiga) yakni **Terwujudnya Ketersediaan Infrastruktur Kota dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan.** Adapun sasaran dari tujuan ke tiga tersebut adalah **Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Infrastruktur dan Layanan Dasar Perkotaan yang Berwawasan Lingkungan.** Tujuan ini bermakna bahwa pembangunan prasarana diarahkan untuk terpenuhinya kelengkapan dasar fisik lingkungan kota bagi kehidupan yang layak, sehat, aman, dan nyaman; terpenuhinya sarana perkotaan untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; dan terpenuhinya kelengkapan penunjang (utilitas) untuk pelayanan warga kota. Tujuan ini juga mengarahkan pembangunan prasarana dan sarana yang meningkat dan serasi, untuk memenuhi kehidupan warga kota yang dinamis, inovatif, dan kreatif, denqan memperhatikan prinsip pengelolaan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup, dalam mewujudkan kota yang maju, tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Berdasarkan strategi dan rencana kerja yang telah disusun, diharapkan pada akhir RPD Kota Bekasi di Tahun 2026 nanti, DBMSDA mampu memenuhi target yang ditetapkan dalam RPD tersebut, melalui peningkatan dan pengembangan infrastuktur kota, penataan sarana dan prasarana, pengelolaan taman, pengelolaan PJU, pengembangan jasa konstruksi, dan penyelenggaraan reklame yang terpadu.

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi dan program Tahun 2024 – 2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DBMSDA dalam jangka 3 (tiga) tahun kedepan. Renstra menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2018 - 2023, dan perubahan lingkungan strategi yang diperkirakan akan timbul pada tiga tahun berikutnya. Penyusunan Renstra DBMSDA dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2024 - 2026.

Rencana Strategis ini bersifat dinamis sehingga dalam perjalanannya dapat dilakukan review, dan apabila terjadi perubahan-perubahan yang signifikan terkait dengan kebijakan pemerintah maupun terjadi perubahan atas kondisi lingkungan strategis, maka dokumen ini dapat dilakukan peninjauan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Renstra ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur DBMSDA Kota Bekasi karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun, dengan demikian Renstra ini bukan hanya sebagai dokumen administrasi karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai visi dan misi yang ingin di capai. Semoga Renstra DBMSDA Kota Bekasi ini dapat diimplentasikan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dan pembangunan berkelanjutan.

**KEPALA DINAS BINA MARGA
DAN SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI**



Drs. H. Abdillah, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630718 199601 1 001